RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN

TAHUN
2025 – 2029

Painan, Juli 2025

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
   a. BAB I pendahuluan;
   b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
   c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
   d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat DPRD;
   c. Inspektorat Daerah;
   d. Dinas Pendidikan;
   e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
   f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   g. Dinas Pertanian;
   h. Dinas Perikanan dan Pangan;
   i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
   j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
   l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   n. Dinas Komunikasi dan Informatika
   o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
   p. Dinas Perhubungan
   q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
å. Kecamatan Pancung Soal;
ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
ö. Kecamatan Lengayang;
aa. Kecamatan Batang Kapas ;
bb. Kecamatan IV Jurai;
cc. Kecamatan Bayang;
dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
ee. Kecamatan Sutera;
ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
gg. Kecamatan Lunang;
hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
jj. Kecamatan Airpura;
kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
ll. Kecamatan Silaut.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Darah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ZAINAL ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan (capaian) implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar untuk penetapan target Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan berakhir dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dengan selesainya dokumen Renstra ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk periode 2025-2029 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan tahap berikutnya bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun rencana pembangunan sektor pertanian tahun yang akan datang. Saran dan kritik membangun demi kesempurnaan dan melengkapi bahan pertimbangan dalam menyusun Renstra kedepan sangat diharapkan.

Semoga dokumen ini bermanfaat dalam merencanakan kemajuan pembangunan sektor pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di masa yang akan datang.

Painan, 31 Juli 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRIANTO, S.Hut. M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR..... v
DAFTAR GRAFIK..... vi
BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1. LATAR BELAKANG..... 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... 6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 11
2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN..... 11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan..... 11
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.. 20
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan..... 27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan..... 43
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan..... 45
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN..... 47
2.2.1. Permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan 47
2.2.2. Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.... 58
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 86
3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029..... 89
3.2. TUJUAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029..... 89
3.3. STRATEGI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030..... 91
3.4. ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029..... 91
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 99
4.1. PROGRAM DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030..... 122
4.2. KEGIATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030..... 125
4.3. SUB KEGIATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030..... 136
4.4. KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 159
4.5. PROGRAM PRO RAKYAT (PROGRAM UNGGULAN BUPATI-WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE TAHUN 2025-2029)..... 164
4.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030..... 169
4.7. INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PERTANIAN KABUPETEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030..... 172
BAB V. PENUTUP..... 174

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Komposisi Aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.2	:	Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan……..	22
Tabel 2.3	:	Daftar Aset Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2024…….	23
Tabel 2.4	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan……..	29
Tabel 2.5	:	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Provitas Padi dan Palawija Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024……..	36
Tabel 2.6	:	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Provitas Sayuran dan Buah- Buahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024……..	36
Tabel 2.7	:	Produksi dan Provitas komoditas Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024……	37
Tabel 2.8	:	Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024……	38
Tabel 2.9	:	Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian……...	39
Tabel 2.10	:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan…….	41
Tabel 2.11	:	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian……..	47
Tabel 2.12	:	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan……	67
Tabel 2.13	:	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029……..	69
Tabel 2.14	:	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya…….	70
Tabel 2.15	:	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya…….	74
Tabel 2.16	:	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya……	76
Tabel 2.17	:	Pengembangan Pusat Kegiatan (PPK) Kabupaten Pesisir Selatan sampai Tahun 2030……	78
Tabel 2.18	:	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah……	81
Tabel 2.19	:	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS……..	82
Tabel 2.20	:	Isu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup……..	82
Tabel 2.21	:	Pemetaan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029……..	83

Tabel 3.1 : Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030…….…….. 90
Tabel 3.2 : Penahapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030…… 92
Tabel 3.3 : Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029……... 97
Tabel 4.1 : Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan…... 101
Tabel 4.2 : Rencana Program Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030…… 123
Tabel 4.3 : Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030…… 126
Tabel 4.4 : Rencana Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030……..…… 137
Tabel 4.5 : Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan……. 160
Tabel 4.6 : Program Pro rakyat Tahun 2025-2030……... 165
Tabel 4.7 : Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030. 166
Tabel 4.8 : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030……... 170
Tabel 4.9 : Indikator Kinerja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030……... 171
Tabel 4.10. : Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2030……. 173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	:	Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan…….....……...	13
Gambar 3.1	:	Konsep Renstra Perangkat Daerah…….	87
Gambar 3.2	:	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah……	88
Gambar 4.1	:	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah……...	99
Gambar 4.2	:	Lima Program Pro Rakyat HJ-RI Tahun 2025-2029….	164

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	:	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....……..	21
Grafik 2.2	:	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan……..	22
Grafik 2.3	:	Perbandingan Pertumbuhan Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dengan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2020-2024……...	33
Grafik 2.4	:	Kontribusi Per Sub Sektor Komoditas Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2020-2024……	34

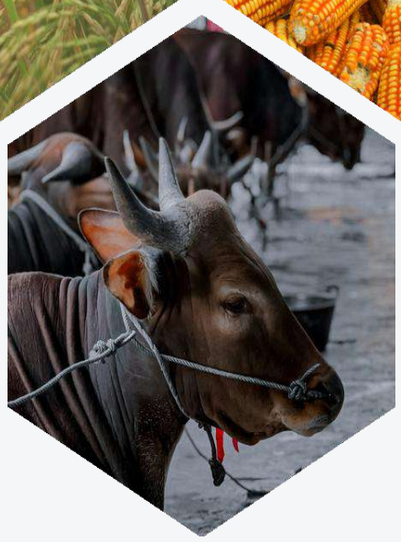

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Renstra menjadi pedoman yang memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang berdampak tidak langsung dalam penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain juga telah memiliki korelasi positif yang kuat dengan sektor pertanian.

Pembangunan pertanian adalah merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber Daya Manusia (SDM) bersama-sama dengan Sumber Daya Alam (SDA), teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan pertanian tersebut antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, harus menyusun Renstra untuk menjaga arah bagi tercapainya rencana pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya sektor pertanian.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 terikat dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain dan bersifat satu kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

   Perencanaan pembangunan skala nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPN dan RPJMN. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang berkaitan dengan kebijakan pangan nasional.

2) Renstra Kementerian Pertanian

   Renstra Kementerian Pertanian adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima Tahun. Renstra Kementerian Pertanian ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.

3) Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

   Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan agar selaras dengan arah Pertanian di provinsi Sumatera Barat.

4) Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

   Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan agar selaras dengan arah Pertanian di provinsi Sumatera Barat.

5) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

   Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima Tahun, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah agar dalam pembangunan pertanian bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

6) Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

   Derivasi dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berupa Renja yang memberi detail gambaran kerja per tahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka 5 (lima) Tahun ke depan;
2) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
4) Kontrak kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kepala Daerah; dan
5) Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

   Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

   1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas.
   2) Orientasi mengenai Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
   3) Penyusunan agenda kerja tim Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
   4) Pengumpulan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

   Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

   1) Pengolahan data dan informasi;
   2) Analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
   3) Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
   4) Penelaahan RTRW;
   5) Analisis terhadap dokumen KLHS;
   6) Perumusan isu-isu strategis;
   7) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah; dan
   8) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

   Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Tahap Penetapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

   Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyelaraskan dengan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, serta Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek keselarasan rencana pembangunan pertanian.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pertanian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan.

Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholder dapat ikut serta dan

berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini dijabarkan kedalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap Tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir Tahun.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264); dan
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap Tahun dan untuk jangka waktu lima Tahun kedepan. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan periode 2025-2029 dengan tujuan :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis dan konsisten sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2025-2029;
b. Identifikasi program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode Tahun 2025-2029 untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik;
c. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program; dan
d. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode lima Tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) BAB dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar belakang;

1.2. Dasar hukum penyusunan;

1.3. Maksud dan tujuan; dan

1.4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Subbab gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat:

2.1.1 Tugas fungsi, dan struktur perangkat daerah;

2.1.2 Sumber daya perangkat daerah;

2.1.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

2.1.4 Kelompok sasaran layanan (misalnya Bapedalitbang, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat paerah);

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

2.1.1 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);

2.1.2 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada); dan

2.1.3 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada).

2.2 Subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:

2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan

2.2.2 Isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

3.1. Tujuan Renstra perangkat daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3.2. Sasaran Renstra perangkat daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3.3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029; dan

3.4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1. Uraian program;

4.2. Uraian kegiatan;

4.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4. Uraian kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5. Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029);

Sub bab ini khusus bagi perangkat daerah pelaksana Program Pro Rakyat. Penyajian subbab ini menguraikan rencana aksi, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam melaksanakan program Pro Rakyat dan ditampilkan dalam bentuk tabel.

4.6. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah; dan

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP.

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

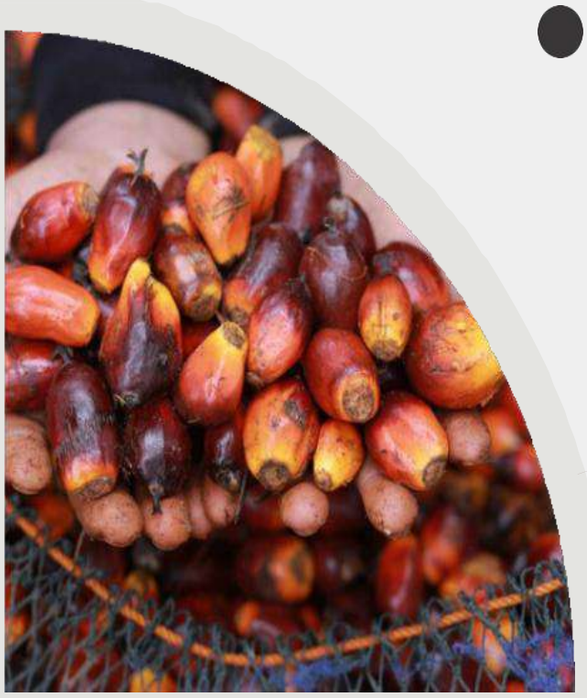

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
   a) Sekretariat;
   b) Bidang Tanaman Pangan;
   c) Bidang Hortikultura;
   d) Bidang Perkebunan;
   e) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
   f) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   g) Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
   h) UPTD;

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

(6) Pada Sekretariat terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.

(7) UPTD yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Dan Fungsi

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b) penyusunan programa penyuluhan pertanian;
c) pengembangan prasarana pertanian;
d) pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e) pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
f) pembinaan produksi dibidang pertanian;
g) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j) pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
l) pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian;
m) pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
(PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2025)

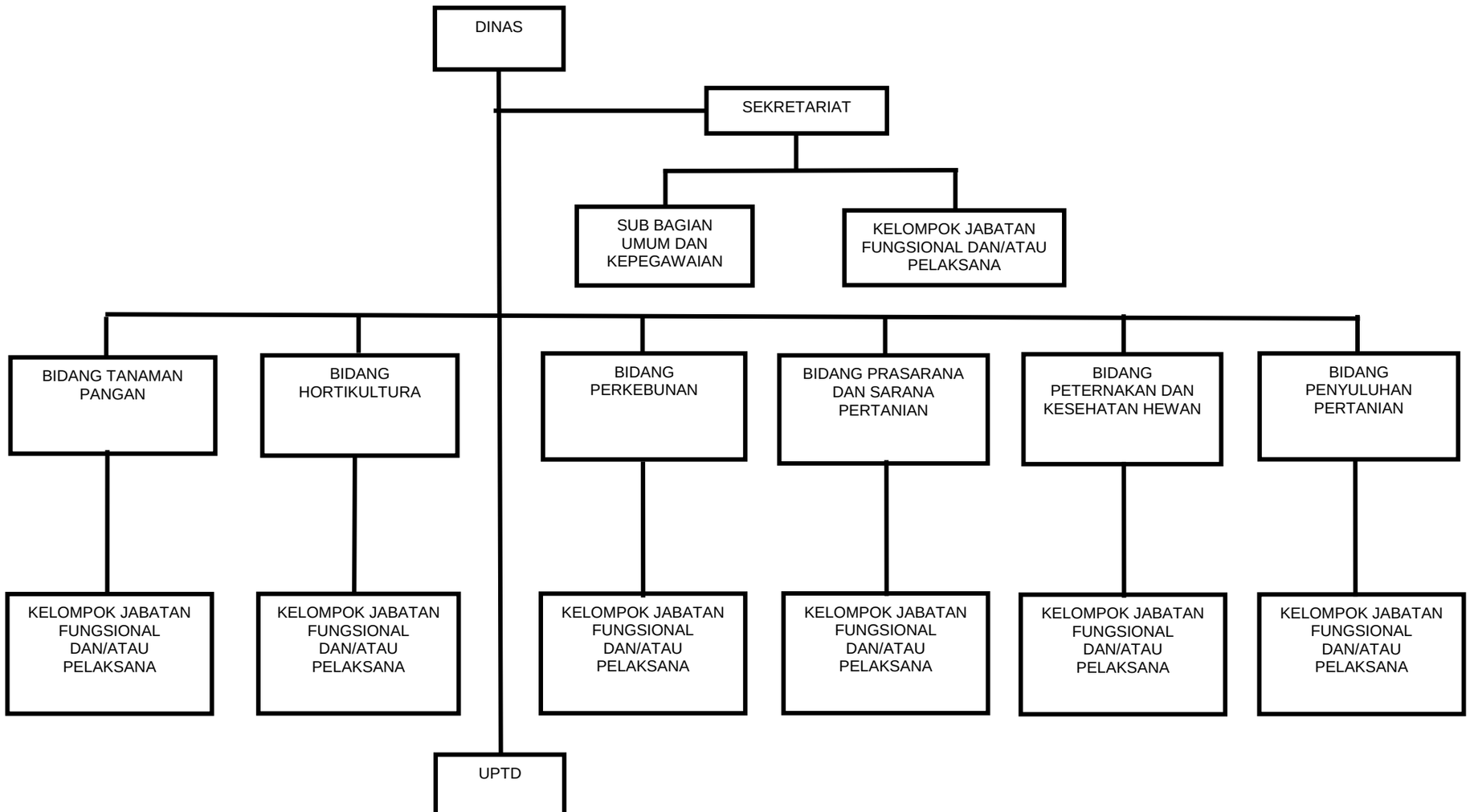

Gambar 2.1 : Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unit kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
c. penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan

kepala dinas;

d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan dinas;
e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan dinas;
f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Tanaman Pangan

(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, panen dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
g. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
i. pengkoordinasian dan konsultasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan di bidang tanaman pangan;
j. pengumpungan, pengolahan dan evaluasi data statistik produksi tanaman pangan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Hortikultura

(1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, panen dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
g. pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
i. pengkoordinasian dan konsultasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan di bidang hortikultura;
j. pengumpungan, pengolahan dan evaluasi data statistik produksi hortikultura; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perkebunan

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit dibidang perkebunan;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
f. pendataan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
h. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
j. pengkoordinasian dan konsultasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program/ kegiatan di bidang perkebunan;
k. pengumpungan, pengolahan dan evaluasi data statistik produksi perkebunan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

(1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen;
e. pemberian bimbingan dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
f. pemberian rekomendasi teknis bidang prasarana dan sarana pertanian;
g. pengkoordinasian dan konsultasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program/ kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta kesehatan hewan;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. pemberian bimbingan pengolahan pakan ternak;
f. pemberian bimbingan pembinaan usaha dan kelembagaan;
g. pengawasan mutu bibit dan pakan ternak;

h. pengawasan penyebaran dan pengembangan benih/bibit ternak, pakan dan hijauan pakan ternak;
i. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
j. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat hewan;
k. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
l. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan meliputi pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan dan pemusnahan hewan;
m. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyrakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
n. pemberian rekomendasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
o. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
p. pengoordinasian dan konsultasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program/ kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
q. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data statistik produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Penyuluhan Pertanian

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metoda penyuluhan pertanian;

d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
e. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
f. pemberiaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
g. peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
i. pengkoordinasian dan konsultasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program/ kegiatan di bidang penyuluhan pertanian; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 278 orang yang terdiri atas :

a. PNS sebanyak 105 orang yang terdiri atas 52 orang laki-laki dan 53 orang perempuan;
b. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 51 orang yang terdiri atas 28 orang laki-laki dan 23 orang perempuan; dan
c. Non PNS sebanyak 122 orang yang terdiri atas 49 orang laki-laki dan 73 orang perempuan.

Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 2.1 dan Grafik 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	ASN						Non ASN			Total
	PNS			PPPK						
	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2024	52	53	**105**	28	23	**51**	49	73	**122**	**278**
Jumlah	**52**	**53**	**105**	**28**	**23**	**51**	**49**	**73**	**122**	**278**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Grafik 2.1
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

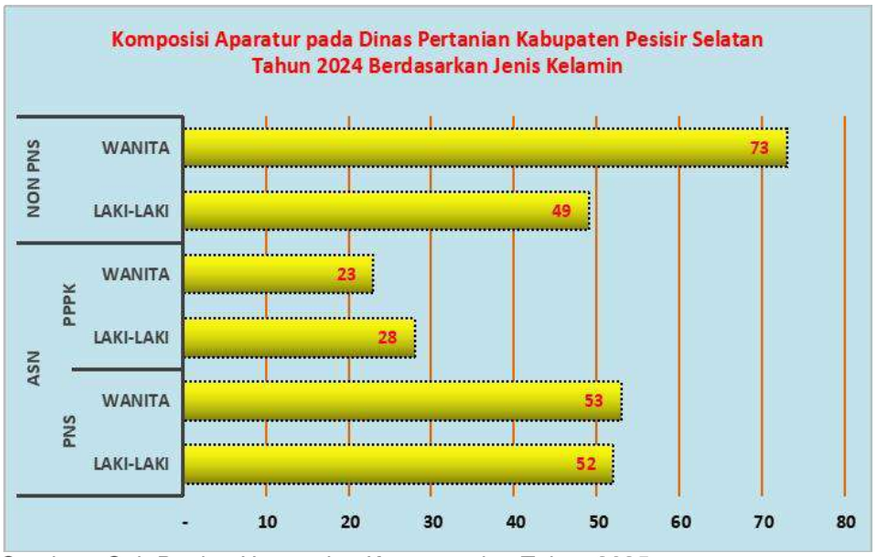

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari Tabel 2.1 dan Grafik 2.1 dapat disimpulkan bahwa SDM aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis kelamin baik yang ASN maupun Non ASN berjumlah sama banyak, artinya ketimpangan kesetaraan gender pada Dinas Pertanian tidak ada.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. PNS dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 11 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 69 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 19 orang;
b. PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 16 orang, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 4 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 30 orang mendominasi jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia; dan
c. Non PNS jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 77 orang, jenjang pendidikan D1/DII/DIII sebanyak 5 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 34 orang, jenjang pendidikan SMP sebanyak 4 orang dan jenjang pendidikan SD sebanyak 2 orang.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	ASN										Non ASN						Total
	PNS					PPPK											
	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Jumlah	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Jumlah	SD	SMP	SMA	DI/ DII /DIII	S1/ DIV	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2024	19	6	69	11	**105**	30	4	16	1	**51**	**2**	**4**	34	5	77	**122**	**278**
Jumlah	**19**	**6**	**69**	**11**	**105**	**30**	**4**	**16**	**1**	**51**	**2**	**4**	**34**	**5**	**77**	**122**	**278**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Grafik 2.2
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

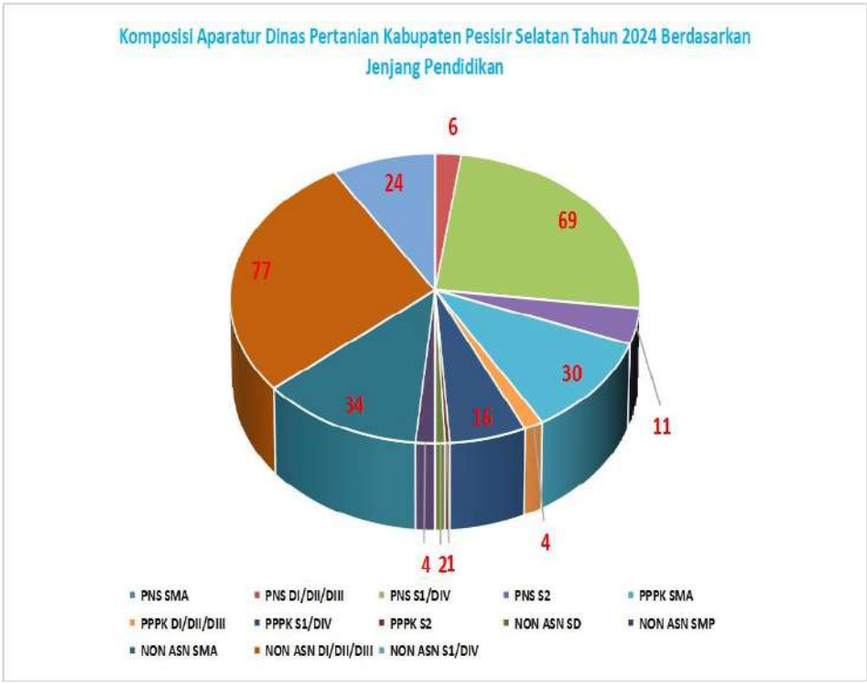

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 dapat disimpulkan bahwa SDM aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenjang pendidikan cukup baik karena 63% berpendidikan S1/S2.

B. Sarana dan Prasarana

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongant tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Aset Dinas Pertanian kondisi tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3. dibawah ini

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2024

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Kondisi
ASET TETAP		**36.730.537.226**	
1	Tanah	2.312.961.482	Baik
2	Peralatan dan Mesin	15.645.432.543	Baik
3	Gedung dan Bangunan	31.430.316.136	Baik
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	8.380.625.806	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	59.084.000	Baik
6	Konstruksi dalam pengerjaan	296.630.000	Baik
	JUMLAH	**36.730.537.226**	

Sumber : Pengurus Barang Dinas Pertanian, 2025

Dari Tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian antara lain:

1. Tanah
   - Tanah bangunan kantor pemerintah di Jalan Ampera Dalam Painan Kecamatan IV Jurai;
   - Tanah bangunan kantor pemerintah tanah pertanian Padang Laban di Kecamatan Ranah Pesisir;
   - Tanah bangunan kantor pemerintah di Gurun Panjang Kecamatan Bayang;
   - Tanah bangunan kantor pemerintah hibah dari pusat di Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir;
   - Tanah bangunan kantor pemerintah hibah dari pusat di Punggasan Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti;
   - Tanah bangunan kantor pemerintah hibah dari pusat di Air Batu Kecamatan Pancung Soal;
   - Tanah kebun entris hibah dari pusat di Air Batu Kecamatan Pancung Soal;
   - Tanah kebun hibah dari pusat di Koto Pulai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
   - Tanah kebun sawit hibah dari pusat di Kecamatan Lunang Silaut;
   - Tanah bangunan kantor pemerintah kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Nagari Pasir Binjai Kampung Rantau Panjang Kecamatan Silaut;
   - Tanah tegalan lahan BPK Tarusan di Cumateh Tarusan;
   - Tanah bangunan kantor pemerintah kantor BPK Bayang di Api –Api Pasar Baru Kecamatan Bayang;
   - Tanah bangunan tempat kerja lainnya BPK Bayu di Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;

- Tanah kosong lahan BPK Batang Kapas di Kecamatan Batang Kapas;
- Tanah kebun di Kenagarian IV Koto Hilir;
- Tanah kosong Ditjentan;
- Tanah kosong yang sudah diperuntukan di Kenagarian Lakitan Kecamatan Lengayang;
- Tanah tegalan lahan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Air Haji di nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Tanah kosong yang sudah diperuntukan di Kenagarian Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- Tanah bangunan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai;
- Tanah bangunan pasar ternak di Kenagarian Lakitan Kecamatan Lengayang;
- Tanah bangunan kantor pemerintah ex tanah Dinas Kelautan dan Perikanan (mutasi) di Jln. Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai;
- Tanah bangunan kandang hewan tanah Rumah Potong di Jln. Pramuka Painan;
- Tanah bangunan-bangunan pembibitan (Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan/P4) di Rawa Beriak Lakitan Kecamatan Lengayang;
- Tanah bangunan pos jaga/menara jaga (tanah Pos Keswan) di Kecamatan Sutera; dan
- Tanah kosong di Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti.

2. Peralatan dan Mesin
   - Kursi, meja dan lemari untuk kebutuhan kantor kabupaten, BPP, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan P4; dan
   - Laptop, personal komputer (PC), printer untuk kebutuhan kantor kabupaten, BPP, Puskeswan, dan P4.
3. Gedung dan Bangunan
   - Gedung kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai;
   - Bangunan BPP sebanyak 15 Unit, masing-masing 1 unit setiap kecamatan;
   - Bangunan gudang tertutup permanen di BPK Kecamatan Sutera;

- Bangunan gudang tertutup permanen gudang BPK Lunang Silaut;
- Bangunan gudang tertutup permanen Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Bangunan gudang tertutup permanen KP padang laban, Nagari Pasie Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
- Bangunan gudang terbuka permanen di Kecamatan Lengayang;
- Halaman lingkungan perkantoran Dinas Pertanian gedung A;
- Rumah dinas golongan I ex BPP/UPTD Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Rumah negara golongan I Type A permanen di Tapan;
- Gedung pertemuan permanen di gedung pertemuan Dinas, luas bangunan 200 M2;
- Plang nama kantor di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai;
- Bangunan taman kantor di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai;
- Gedung kantor Dinas Pertanian Gedung B;
- Bangunan Puskeswan sebanyak 7 Unit yaitu di Kecamatan Bayang, IV. Jurai, Sutera, Ranah Pesisir, Air Pura, Lunang dan Silaut;
- Bangunan P4 di Kecamatan Lengayang dan Linggo Sari Baganti;
- Bangunan pasar ternak di Lakitan Kecamatan Lengayang; dan
- Bangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Painan Kecamatan IV Jurai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
   - Instalasi lampu di Painan;
   - Pengamanan tebing sungai di Kecamatan Silaut;
   - Instalasi jaringan elektronik di Balai Benih Tanaman Pangan (BBTP) Padang Laban;
   - Jalan desa di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
   - Jembatan beton BPP Lunang Silaut Di Kecamatan Lunang Silaut;
   - Waduk bendungan tanggul menara pengambilan pelimpahan banjir dan terowongan pengelak di lahan Air Haji;

- Saluran tersier di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bangunan embung/dam parit;
- Bangunan jembatan;
- Sawah pasang surut semi teknis;
- Saluran drainase dan bangunan saluran drainase/ gorong-gorong;
- Jalan desa di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Saluran tersier di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Jalan P4 di Kecamatan Lengayang;
- Jaringan listrik untuk Puskeswan di Kecamatan Bayang;
- Jaringan listrik untuk Puskeswan di Kecamatan IV. Jurai;
- Jaringan listrik untuk puskeswan di Kecamatan Sutera;
- Jaringan listrik untuk Puskeswan di Kecamatan Ranah Pesisir;
- Jaringan listrik untuk Puskeswan di Kecamatan Air Pura;
- Jaringan listrik untuk Puskeswan di Kecamatan Lunang; dan
- Jaringan listrik untuk Puskeswan di Kecamatan Silaut.

5. Aset Tetap dan Lainnya
   - Pengadaan buku referensi;
   - Buku ilmu pengetahuan umum;
   - Buku kebudayaan;
   - Ilmu perpustakaan;
   - Buku ilmu kesehatan;
   - Buku lembaran daerah;
   - Bahasa inggris;
   - Buku ilmu pengetahuan alam;
   - Pertanian, kehutanan dan perikanan;
   - Majalah;
   - Buku laporan penelitian;
   - Buku peraturan perundang-undangan; dab
   - Buku seni.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
   - Detail Engineering Design (DED) Pasar Ternak Tapan;
   - (FS) Pasar Ternak Tapan;
   - UKL UPL Pasar Ternak Tapan;
   - Penyusunan DED RPH Painan;
   - Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup RPH Painan;
   - Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan; BPP Kecamatan Ranah IV. Hulu Tapan;

- Reviu Design BPP Kecamatan Ranah IV. Hulu Tapan;
- Honor DED BPP Kecamatan Silaut; dan
- Honor DED Rehab Gedung BPP Kecamatan Bayang Utara.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dapat dinilai dari dua aspek yaitu: Kinerja aspek makro ekonomi yang menyangkut kontribusinya terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi, pertanian, peternakan, dan indikator kesejahteraan masyarakat. Selain kinerja aspek ekonomi, pelayanan di bidang pertanian juga dapat dinilai dari kinerja aspek teknis yang meliputi populasi, produksi, dan konsumsi produk hasil pertanian dan peternakan.

Kinerja Aspek Makro Ekonomi

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam struktur PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain.

Pembangunan di bidang pertanian dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat petani/ peternak. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna, peningkatan produksi, peningkatan sumber daya masyarakat tani, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi mendukung usaha pertanian, serta penataan dan pengembangan kelembagaan usaha pertanian. Keberhasilan pembangunan di bidang pertanian sangat ditentukan oleh empat faktor utama penggerak pembangunan yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam (lahan, tanaman dan ternak), teknologi dan kelembagaan. Keempat faktor penggerak pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara sinergis dan terintegratif, secara menyeluruh (holistik), secara tematik, dan mempertimbangkan tata ruang (spasial) untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkualitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kinerja Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pelayanan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-							Realisasi Capaian Tahun ke-							Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian			√	-	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	90,74 (AA)	91,89 (AA)	88,77 (A)	88,92 (A)	89,50 (A)	-	-	100,00	104,18	100,15	99,81	99,97	-	-
2	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian			√	-	-	85	100	100	100	100	-	-	85,00	92,00	90,00	-	-	-	-	100,00	92,00	90,00	-	-
3	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) (Triliyun)			√	-	2,90	2,98	3,04	3,10	3,16	3,23	2,82	2,90	2,98	3,05	3,05	-	-	100,00	100,00	100,00	100,33	98,36	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kesenjangan/gap pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa kinerja yang tercapai dan ada yang belum tercapai, berikut penjelasannya:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/ target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome

dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian periode Tahun 2020-2024 nilai rata-rata **"A"** dengan predikat **"Memuaskan"**. Dalam penilaian ada 4 (empat) komponen penilaian, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

2) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian

Inovasi adalah suatu perubahan baru yang mencakup ide, gagasan, praktik, atau objek yang bersifat spesifik dan disengaja, dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai kematangan adalah tingkat keterisian parameter dan eviden secara benar dan sesuai, yang berdampak pada kualitas penilaian inovasi dalam indeks. Selain itu, kualitas inovasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Dinas Pertanian selama periode Tahun 2020-2024 mempunyai 2 (dua) inovasi, yaitu: (1) Door To Door Vaksin Action (DOVAC) dengan nilai kematangan 90; dan (2) Varietas Durian Ponger dengan nilai kematangan 78, akan tetapi hanya inovasi DOVAC yang dikirimkan ke Kemendagri karena nilai kematangan cukup tinggi. Kemendagri

menjelaskan, pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan. Selama ini, banyak pemerintah daerah hanya fokus menambah jumlah inovasi, tapi tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya. Akibatnya, kendati inovasi yang diinput berjumlah banyak, namun capaian itu tidak menunjang hasil nilai indeks yang maksimal. Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai (https://bskdn.kemendagri.go.id/).

Kondisi ini disebabkan karena hasil inovasi yang dilaporkan kurang matang. Salah satu pemicunya karena tidak disertakannya evidence based saat melakukan penginputan inovasi. sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah, yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. Selain itu, peningkatan infrastruktur inovasi. Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis.

3) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia pada awal Tahun 2020, seluruh sektor mulai merangkak bangkit kembali ke kondisi awal setelah mengalami keterpurukan. Lain halnya dengan sektor pertanian, sektor pertanian mencatat peningkatan selama pandemi dan sesudah pandemi berlalu. Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga konstan pada Tahun 2020 bernilai 9,47 triliyun, Tahun 2021 bernilai 9,79 triliyun, Tahun 2022 bernilai Rp.10,18 triliyun, Tahun 2023 bernilai Rp.10,60 triliyun dan menjadi Rp.11,01 triliyun pada Tahun 2024, sedangkan nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) pada Tahun 2020 bernilai 2,82 triliyun, Tahun 2021 bernilai 2,90 triliyun, Tahun 2022 bernilai 2,98 triliyun, Tahun 2023 bernilai 3,05 triliyun dan Tahun 2024 bernilai 3,05 triliyun (data capaian Tahun 2023).

Grafik perbandingan pertumbuhan Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dengan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut:

Grafik 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dengan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2020-2024

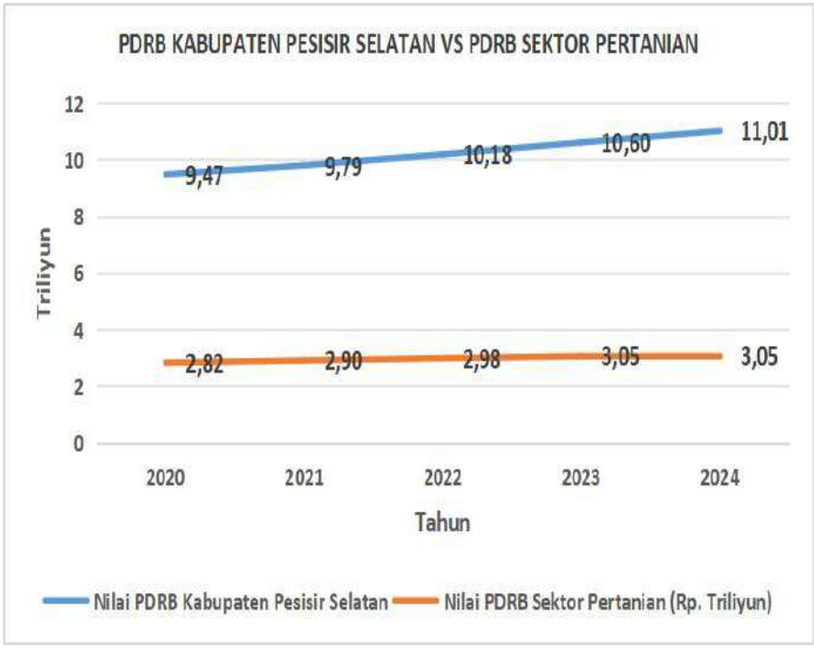

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari Grafik 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian setiap tahunnya menyumbangkan ± 30% terhadap nilai total PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

Pertanian merupakan salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti dengan kontribusinya terhadap PDRB yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian adalah tanaman pangan kemudian disusul oleh perkebunan tahunan, peternakan, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim, jasa pertanian dan perburuan. Tingginya kontribusi tanaman pangan dan perkebunan tahunan tidak lain disebabkan oleh komoditas padi, jagung dan kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Grafik kontribusi per sub sektor komoditas pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dapat dilihat pada Grafik 2.4 dibawah ini:

Grafik 2.4
Kontribusi Per Sub Sektor Komoditas Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2020-2024

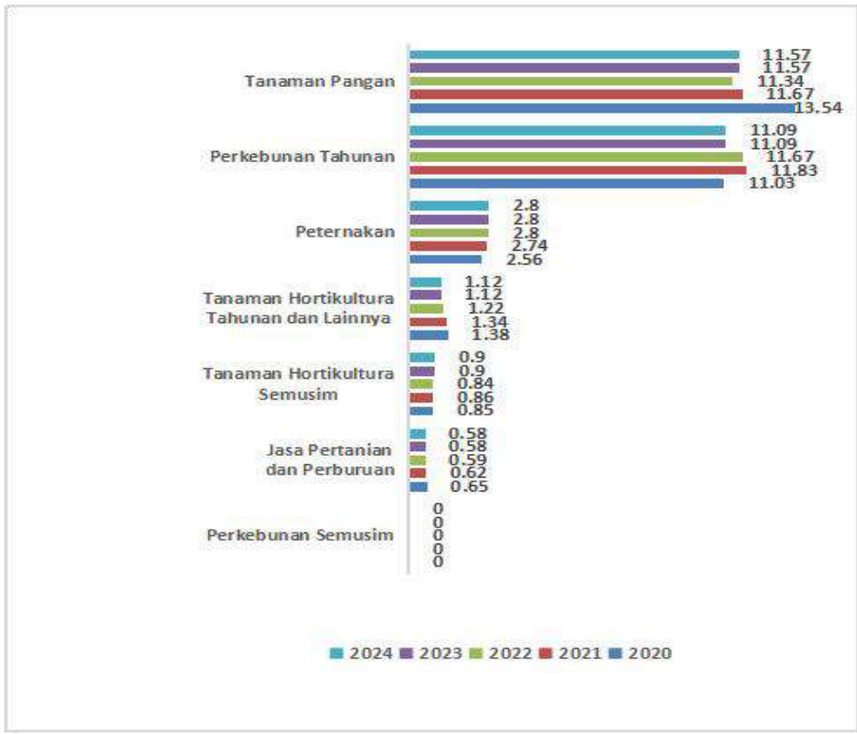

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tidak terlepas dari peningkatan produksi pertanian. Data BPS Tahun 2024, luas lahan sawah 23.885,09 Ha yang terdiri dari sawah irigasi 17.301,92 Ha, tadah hujan 6.492,17 Ha, pasang surut 39 Ha, dan lebak 52 Ha. Luas panen padi sawah Tahun 2024 sebanyak 34.662,32 Ha dan hampir seluruh Kecamatan memproduksi padi kecuali Silaut.

Dalam upaya melindungi keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan petani, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perlindungan LP2B dilakukan terhadap LP2B, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), Lahan Rawan Konversi dan Lahan Potensi. Total Luas LP2B adalah 22.746,10 ha, dengan rincian luas LP2B adalah 17.944,20 ha; dan luas LCP2B adalah 4.801,90 ha. luas lahan rawan konversi adalah 2.473,20 Ha, dan luas lahan potensi adalah 524,63 ha.

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan komoditas unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor

050/417/Kpts/BPT-PS/2024. Kegiatan rutin lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan bantuan sarana dan prasarana, bibit dan pupuk bersubsidi kepada kelompok-kelompok tani yang memiliki untuk meringankan biaya produksi, memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani untuk meningkatkan sumber daya manusia petani, melakukan pendampingan terhadap petani dengan menempatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) disetiap Kecamatan.

Beberapa hal yang perlu di optimumkan kedepannya adalah; penjaminan kestabilan harga komoditas, fokus pengembangan terhadap komoditas unggulan masing-masing nagari, penggunaan pupuk organik, pemberantasan hama dan penyakit menggunakan cara-cara ramah lingkungan, antisipasi yang konkrit untuk serangan hama yang masif, mengoptimalkan fungsi irigasi yang rusak, membuat zonasi kecocokan jenis tanah dengan komoditas yang dikembangkan.

Jagung dan ubi kayu, komoditas palawija lainnya yang dihasilkan, Jagung banyak diproduksi di Kecamatan Airpura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan dan Lunang, Ubi kayu banyak di produksi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang. Tahun 2024 terjadi penurunan luas panen komoditas padi dan palawija, hal ini disebabkan oleh rusaknya beberapa jaringan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra produksi padi seperti Irigasi Batang Jalamu Kecamatan Batang Kapas, Irigasi Koto Kandis Kecamatan Lengayang, DI Koto Nan IV Kecamatan Ranah Pesisir, DI Bantaian Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Irigasi Sei Sirah Kecamatan Lunang. Faktor lain adalah terjadinya bencana banjir pada tanggal 7 Maret 2024 yang merendam lahan pertanian seluas 4.671,73 Ha, tanaman padi seluas 4.319,38 Ha dan jagung seluas 222,50 ha serta meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Berikut di tampilkan data-data pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija, pada Tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Provitas Padi dan Palawija Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Provitas (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Padi	78.645	30.441	28.779	38.928	34.662	382.461	146.141	161.639	201.974	167.598	5,01
2	Jagung	28.119	22.941	18.290	17.323	17.223	241.377	202.912	217.213	138.579	127.628	8,38
3	Ubi Kayu	379	301	315	261	226	7.078	11.562	12.107	8.025	7.178	31,01
4	Ubi Jalar	2	29	32	16	52	24	928	1.017	591	1.543	31,37
5	Kedelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kacang Hijau	73	73	26	32	13	96	85	33	24	11	1,16
7	Kacang Tanah	308	382	214	202	182	400	592	330	268	249	1,43

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2025

Kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan juga berpotensi untuk dikembangkan, lima komoditas sayuran yang banyak produksinya yaitu; cabe merah, terong, mentimun, terong, kangkung dan bayam. Cabe Merah dihasilkan paling banyak di Kecamatan Sutera. Buah-buahan unggulan yang dikembangkan yaitu ; semangka, durian, rambutan, pisang, mangga dan manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu tahun 2003 sampai sekarang. Durian merupakan komoditas unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua Kecamatan memiliki durian dengan produksi rata-rata 28,49 ton/ha. Berdasarkan data BPS Tahun 2025, lima Kecamatan menghasilkan durian terbanyak yaitu ; Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV. Jurai, Batang Kapas, dan Sutera. Pertumbuhan luas panen, produksi dan provitas sayuran dan buah-buahan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Provitas Sayuran dan Buah-Buahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Provitas (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
I	**Sayuran**											
1	Cabe Merah	425	401	354	383	301	5.513	5.513	5.042	4.975	3.482	13,35
2	Bawang Merah	6	24	23	65	10	39	172	146	453	71	6,95
3	Terong	168	134	146	149	158	2.792	2.370	2.588	2.305	2.648	16,88
4	Mentimun	191	206	147	182	171	1.717	1.852	1.324	1.392	1.537	8,73
5	Bayam	110	89	123	102	125	548	482	617	649	621	5,31
6	Kangkung	154	149	120	117	143	769	744	599	752	717	5,24
7	Tomat	-	1	10	-	6	-	5	111	-	34	9,40
II	**Buah – Buahan**											

1	Semangka	397	595	159	189	96	7.940	11.936	3.125	1.605	1.912	18,16
2	Rambutan	194	264	260	112	285	4.320	4.461	5.942	2.853	5.182	20,41
3	Mangga	289	301	463	263	359	4.189	4.870	7.028	5.135	6.190	16,36
4	Durian	290	376	659	547	744	8.231	11.046	18.482	16.025	20.741	28,49
5	Pisang	184	222	198	123	134	10.859	9.695	9.986	12.919	13.918	66,48
6	Jeruk	119	126	118	118	116	16.536	4.930	4.465	4.412	3.866	57,28
7	Duku	21	61	99	21	74	250	724	1.246	404	1.148	13,65
8	Manggis	173	195	246	155	197	2.376	4.321	4.695	3.374	3.482	18,89
9	Salak	2	2	2	2	1	199	179	177	185	139	108,38
10	Pepaya	10	8	7	8	10	1.723	1.294	1.187	1.312	1.804	166,79
11	Belimbing	2	3	3	2	3	155	165	219	1450	181	66,93
12	Alpukat	3	7	5	5	7	182	280	221	240	287	44,86

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2025

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa komoditas unggulan perkebunan yaitu ; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa, kakao dan kopi. Kelapa dihasilkan banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti dan Airpura. Pengolahan komoditas kelapa masih belum optimal, sehingga nilai tambah dari kelapa tersebut belum dihasilkan. Kedepannya potensi ini harus menjadi skala prioritas untuk dikembangkan mulai dari hulu sampai produk hilirnya.

Luas Tanaman Kelapa Sawit 43.358 Ha dengan jumlah produksi 78.124 ton CPO pada data BPS Tahun 2025. Sentra pengembangan Kelapa Sawit Rakyat terdapat di Kecamatan Silaut, Lunang, Ranah Ampek Hulu Tapan, Basa Ampek Balai Tapan, Pancung Soal, Air Pura, Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang dan Sutera. Luas tanam kopi 2.040 Ha, dan jumlah produksi mencapai 2.510 ton. Pusat pengembangannya yaitu Kecamatan IV. Jurai, Lengayang, Linggo Sari Baganti dan Ranah Ampek Hulu Tapan. Luas Tanaman Gambir 10.514 Ha dengan jumlah produksi 7.272 ton. Sentra pengembangan Tanaman Gambir terdapat di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas dan Sutera. Berikut pada Tabel 2.7 disajikan data produksi dan provitas perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Produksi dan Provitas komoditas Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					Provitas (Ton/Ha)					Provitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kelapa Sawit	84.442	83.414	79.850	77.352	78.124	2,22	2,89	2,03	1,56	1,57	2,05
2	Karet	10.518	11.280	11.146	10.038	10.185	1,55	1,64	1,68	1,32	1,40	1,52
3	Gambir	5.921	4.005	5.945	5.668	7.272	0,39	0,40	0,45	0,39	0,56	0,44
4	Pala	975	981	912	1.007	1.066	0,73	0,74	0,73	0,70	0,80	0,74

5	Kakao	1.088	1.077	1.061	786	805	0,43	0,44	0,41	0,44	0,47	0,44
6	Kopi	2.297	2.328	2.373	2.506	2.510	1,49	1,54	1,55	1,40	1,43	1,48
7	Cengkeh	322	326	339	299	301	0,32	0,33	0,35	0,24	0,25	0,29
8	Kelapa	3.446	3.494	3.154	3.509	3.472	0,97	0,98	1,00	1,04	1,06	1,01
9	Pinang	335	335	324	338	339	0,37	0,37	0,35	0,39	0,48	0,39
10	Kulit Manis	1.221	1.270	1.309	1.163	1.245	1,41	0,43	0,46	1,20	1,30	0,96

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2025

Komoditas peternakan juga termasuk sektor pertanian, terdapat beberapa komoditas unggulan peternakan yaitu ; sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik manila. Sapi banyak dihasilkan di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV. Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, dan Linggo Sari Baganti. Kambing banyak di Kecamatan Bayang, IV Jurai, dan Batang Kapas. Ayam Buras di Kecamatan Bayang, IV. Jurai dan Lengayang. Ayam Ras Pedaging di Kecamatan IV. Jurai, Batang Kapas, Air Pura dan Pancung Soal. Ayam Ras Petelur di Kecamatan IV Jurai. Itik di Kecamatan Bayang, IV. Jurai dan Batang Kapas.

Program/kegiatan untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak yaitu ; memberikan bibit ternak, melatih cara pengolahan pakan ternak, Inseminasi Buatan (IB), dan membentuk kawasan pengembangan ternak di Kecamatan Sutera dan kawasan peternakan sapi terintegrasi sawit di Kecamatan Silaut, memberikan bantuan asuransi ternak, pengolahan hasil ternak seperti pembuatan telur asin dan kegiatan lainnya.

Kedepannya perlu dioptimalkan pengembangan komoditas unggulan daerah seperti Sapi Pesisir Selatan, Itik Bayang dan ayam lokal, serta menjamin kestabilan harga ternak. Berikut ditampilkan data populasi ternak di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2.8
Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Jenis	Populasi Ternak (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi	85.031	86.593	86.630	75.288	87.874
2	Kerbau	7.998	8.808	8.816	7.575	8.590
3	Kambing	28.653	28.783	28.999	22.730	22.662
4	Ayam Buras	752.650	776.979	803.768	668.364	705.433
5	Ayam Ras Pedaging	2.460.300	2.994.000	3.167.000	1.867.040	1.776.500
6	Ayam Ras Petelur	81.800	109.400	110.186	82.900	71.150
7	Itik/Itik Manila	179.445	196.633	217.954	508.109	154.750

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2025

B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Data capaian realisasi IKK urusan pemerintahan sektor pertanian dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9
Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB (%)	26,80	25,70	25,07	24,68	24,68*
2.	Kontribusi Tanaman PanganTerhadap PDRB (%)	13,54	11,67	11,34	11,57	11,57*
3.	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB(%)	11,03	11,83	11,67	11,09	11,09*
4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	58,42	65,38	70,91	61,02	56,92
5.	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
6.	Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	2,56	2,74	2,80	2,80	2,80*
7.	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
8.	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	33,16	10,45	5,86	-81,26	4,52
9.	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Kontribusi Sektor Pertanian,Peternakan, Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,01	29,06	28,47	28,06	28,06*
11.	Persentase Pertanian Per Hektare Per Tahun (%)	0	0	0	0	0
12	Jumlah Kasus Zoonosis yang dilaporkan (kasus)	134	148	155	310	212

*Catatan : * Angka Sementara (ASEM Tahun 2024)*
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari Tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian IKK urusan Pemerintahan Sektor Pertanian selama periode 2020-2024 fluktuatif dikarenakan dalam pencapaian IKK sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor seperti berikut:

a) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dari Tabel 2.9 diatas dapat diuraikan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung turun dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 7,91% dari 26,80 Tahun 2020 menjadi 24,68 Tahun 2024, hal ini disebabkan ada sektor lainnya yang mengalami kenaikan seperti sektor industri pengolahan dan sektor

perdagangan dan eceran. Namun nilai PDRB sektor pertanian cenderung naik dalam 5 (lima) tahun terakhir.

b) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi adalah ukuran hasil produksi padi per hektar lahan dalam periode tertentu, yang sangat penting untuk keberhasilan pertanian dan ketahanan pangan. Dari Tabel 2.9 diatas produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dalam 5 (lima) tahun berfluktuasi. Naik turunnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Lahan

  Kualitas tanah yang relatif rendah merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas lahan pertanian. Selain karakteristik lahan, degradasi atau penurunan kualitas lahan pertanian dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia yang tidak melakukan sistem pengolahan lahan secara tepat dan berkelanjutan.
- Benih

  Jumlah penggunaan benih bermutu yang sesuai anjuran mampu mengurangi faktor risiko kegagalan panen dan meningkatkan produktivitas.
- Frekuensi Mengikuti Penyuluhan

  Petani yang sering mengikuti penyuluhan atau pelatihan pertanian cnderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang praktik pertanian yang efektif, yang dapat meningkatkan produktivitas.
- Hama dan Penyakit Tumbuhan

  Hama dan penyakit tumbuhan sangat berpengaruh terhadap hasil panen tanaman pangan terutama padi sawah dan pangan lokal lainnya.
- Manajemen Pertanian

  Praktik manajemen yang baik, termasuk pengelolaan air dan rotasi tanaman dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi dan pangan utama lainnya per hektar.

c) Cakupan Bina Kelompok Tani

Cakupan bina kelompok tani yaitu jumlah kelompok tani yang difasilitasi dengan bantuan pemerintah dalam 1 (satu) tahun baik

itu melalui APBD maupun APBN. Dalam 5 (lima) tahun terakhir cakupan bina kelompok tani berfluktuatif dan cenderung turun. Turunnya cakupan bina kelompok tani ini selain berkurangnya alokasi kegiatan di kelompok tani juga dipengaruhi semakin bertambahnya jumlah kelompok tani setiap tahunnya.

d) Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis

Naik dan turunnya kasus penyakit hewan dan zoonosis di Kabupaten Pesisi Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir disebabkan oleh:

- Perpindahan Hewan

  Volume perdagangan hewan sangat besar dan terus berkembang. Hewan-hewan yang diangkut masuk ke dalam beberapa kategori, yaitu ternak dan unggas, hewan eksotis untuk hewan peliharaan, dan satwa liar. Semua jenis yang berkaitan dengan hewan komersial berpotensi naik dan turunnya penyakit hewan dan zoonosis.

- Konsumsi Pangan Asal Hewan

  Peningkatan jumlah penduduk juga diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan protein hewani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, produksi ternak harus ditingkatkan. Peternakan hewan intensif untuk konsumsi diperlukan dalam skala ekonomi besar serta dilalulintaskan dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga potensi penyebaran penyakit juga tinggi.

- Gangguan Ekologi

  Gangguan ekologi adalah masalah besar lain yang mungkin sebagai salah satu faktor yang paling berbahaya dalam munculnya penyakit hewan dan zoonosis.

C. Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pada Tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025*	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Dinas Pertanian																	
Kabupaten Pesisir Selatan																	
Urusan Pertanian																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**26.800.000**	**24.200.000**	**24.200.000**	**15.600.000**	**-**	**34.976.500**	**21.775.500**	**8.700.000**	**-**	**-**	**130,51**	**89,98**	**35,95**	**-**	**-**	**(41,79)**	**(100,00)**
1. Restribusi Daerah	26.800.000	24.200.000	24.200.000	15.600.000	-	34.976.500	21.775.500	8.700.000	-	-	130,51	89,98	35,95	-	-	(41,79)	(100,00)
Jumlah Pendapatan	**26.800.000**	**24.200.000**	**24.200.000**	**15.600.000**	**-**	**34.976.500**	**21.775.500**	**8.700.000**	**-**	**-**	**130,51**	**89,98**	**35,95**	**-**	**-**	**(41,79)**	**(100,00)**
BELANJA DAERAH	**50.203.107.303**	**48.714.374.634**	**35.104.880.696**	**22.338.827.646**	**-**	**48.037.288.412**	**44.098.790.126**	**30.070.325.143**	**1.524.584.709**	**-**	**95,69**	**90,53**	**85,66**	**6,82**	**-**	**(55,50)**	**(96,83)**
1. Belanja Operasi	**45.017.743.475**	**40.078.582.758**	**34.464.453.075**	**22.274.365.146**	**-**	**43.001.898.880**	**35.910.660.426**	**29.537.338.143**	**1.524.584.709**	**-**	**95,52**	**89,60**	**85,70**	**6,84**	**-**	**(50,52)**	**(96,45)**
- Belanja Pegawai	17.624.400.044	15.987.528.936	18.066.353.621	16.017.029.695	-	17.275.624.672	15.144.019.780	15.814.034.057	1.482.094.737	-	98,02	94,72	87,53	9,25	-	(9,12)	(91,42)
- Belanja Barang dan Jasa	11.313.917.270	11.103.676.466	10.973.115.233	5.371.067.051	-	10.254.196.353	9.978.688.996	8.625.450.685	42.489.972	-	90,63	89,87	78,61	0,79	-	(52,53)	(99,59)
- Belanja Hibah	16.079.426.161	12.987.377.356	5.424.984.221	886.268.400	-	15.472.077.855	10.787.951.650	5.097.853.401	-	-	96,22	83,06	93,97	-	-	(94,49)	(100,00)
2. Belanja Modal	**5.185.363.828**	**8.635.791.876**	**640.427.621**	**64.462.500**	**-**	**5.035.389.532**	**8.188.129.700**	**532.987.000**	**-**	**-**	**97,11**	**94,82**	**83,22**	**-**	**-**	**(98,76)**	**(100,00)**
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.222.092.478	3.081.291.876	139.017.621	64.462.500	-	2.123.865.252	2.941.825.100	120.140.000	-	-	95,58	95,47	86,42	-	-	(97,10)	(100,00)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.763.271.350	5.554.500.000	501.410.000	-	-	2.711.764.280	5.246.304.600	412.847.000	-	-	98,14	94,45	82,34	-	-	(100,00)	(100,00)
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	-	-	-	-	199.760.000	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	(100,00)	(100,00)
Jumlah Belanja	**50.203.107.303**	**48.714.374.634**	**35.104.880.696**	**22.338.827.646**	**-**	**48.037.288.412**	**44.098.790.126**	**30.070.325.143**	**1.524.584.709**	**-**	**95,69**	**90,53**	**85,66**	**6,82**	**-**	**(55,50)**	**(96,83)**

Catatan : * Realisasi sampai kondisi 28 Februari 2025

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.10 diatas dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya berkategori baik. Hal ini disebabkan karena lebih mantapnya program pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, disertai dengan penajaman prioritas dan fokus kegiatan program yang benar-benar dilandasi oleh analisis keadaan, analisis potensi sumberdaya yang akurat, sinergitas program antar dinas/instansi terkait pada setiap tingkatan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat lapangan, serta sejalan dengan tuntutan kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah/nasional.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah kelembagaan petani yang mencakup :

a) Kelompok Tani

Menurut Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2016 yang dimaksud Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Sesuai dengan data pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) jumlah Poktan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 2.232 unit yang tersebar di 15 Kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Koto XI Tarusan : 128 unit
- Kecamatan Bayang : 137 unit
- Kecamatan Bayang Utara : 52 unit
- Kecamatan IV. Jurai : 134 unit
- Kecamatan Batang Kapas : 120 unit
- Kecamatan Sutera : 234 unit
- Kecamatan Lengayang : 245 unit
- Kecamatan Ranah Pesisir : 244 unit
- Kecamatan Linggo Sari Baganti : 259 unit
- Kecamatan Airpura : 152 unit
- Kecamatan Pancung Soal : 161 unit

- Kecamatan Basaba Tapan : 74 unit
- Kecamatan Rahul Tapan : 81 unit
- Kecamatan Lunang : 129 unit
- Kecamatan Silaut : 82 unit

b) Gabungan Kelompok Tani

Menurut Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2016 yang dimaksud Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Sesuai dengan data pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) jumlah Gapoktan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 159 unit yang tersebar di 15 Kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Koto XI Tarusan : 19 unit
- Kecamatan Bayang : 16 unit
- Kecamatan Bayang Utara : 4 unit
- Kecamatan IV. Jurai : 12 unit
- Kecamatan Batang Kapas : 9 unit
- Kecamatan Sutera : 13 unit
- Kecamatan Lengayang : 9 unit
- Kecamatan Ranah Pesisir : 11 unit
- Kecamatan Linggo Sari Baganti : 16 unit
- Kecamatan Airpura : 9 unit
- Kecamatan Pancung Soal : 9 unit
- Kecamatan Basaba Tapan : 6 unit
- Kecamatan Rahul Tapan : 6 unit
- Kecamatan Lunang : 10 unit
- Kecamatan Silaut : 10 unit

c) Kelembagaan Ekonomi Petani

Menurut Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2016 yang dimaksud Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Berdasarkan data statistik pertanian Tahun 2024, jumlah KEP di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 68 unit yang tersebar di 15 Kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Koto XI Tarusan : 3 unit
- Kecamatan Bayang : 0 unit
- Kecamatan Bayang Utara : 4 unit
- Kecamatan IV. Jurai : 0 unit
- Kecamatan Batang Kapas : 6 unit
- Kecamatan Sutera : 12 unit
- Kecamatan Lengayang : 1 unit
- Kecamatan Ranah Pesisir : 10 unit
- Kecamatan Linggo Sari Baganti : 9 unit
- Kecamatan Airpura : 2 unit
- Kecamatan Pancung Soal : 13 unit
- Kecamatan Basaba Tapan : 6 unit
- Kecamatan Rahul Tapan : 0 unit
- Kecamatan Lunang : 5 unit
- Kecamatan Silaut : 3 unit

d) Asosiasi Komoditas Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2016 yang dimaksud Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.

e) Dewan Komoditas Pertanian Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2016 yang dimaksud Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk melengkapi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun mitra dalam pemberian pelayanan adalah :

a) Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah kementerian negara yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan.

b) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

c) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

   Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang peternakan.

d) Badan Pusat Statistik

   Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik di Indonesia.

e) Perbankan

f) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak disektor pertanian.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.2.1. Permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pertanian pada periode sebelumnya, yaitu periode 2021-2026. Namun demikian, guna menyusun rencana pembangunan pertanian yang lebih baik, maka diperlukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja. Beberapa persoalan mendasar yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di masa mendatang, khususnya Tahun 2025-2029, adalah kerusakan lingkungan, perubahan iklim, sarana dan prasarana (insfrastruktur), kepemilikan lahan, sistem perbenihan, akses petani terhadap permodalan, kelembagaan petani dan penyuluh, serta keterpaduan antar sektor.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2030, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Tabel. 2.11
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya tingkat pendapatan petani	Kepemilikan lahan petani dalam skala kecil (<0,3 Ha) dan berpencar, jam kerja petani belum optimal, rendahnya efisiensi usaha tani, Tingginya biaya produksi, rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian serta kurangnya penerapan teknologi pertanian	Minimnya modal dalam berusaha tani
			Rendahnya jam kerja efektif RTP yang sangat berkaitan erat dengan tingkat diversifikasi usaha tani
			Mahalnya harga sarana produksi pertanian
			Rendah SDM petani dalam peningkatan nilai tambah
			belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani
2	Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan.	Menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan	Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan
3	Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan	Belum optimalnya pendampingan oleh petugas	Rendahnya minat petani memanfaatkan lahan perkarangan
4	Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian	Kurang terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
		Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal	Kerusakan sarana dan prasarana pertanian yang dapat menghambat proses produksi
5	Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat	Pemakaian benih bersertifikat di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah.	Kebiasaan petani yang lebih menyukai penggunaan benih lokal
			Rendahnya kesadaran petani menggunakan benih bermutu

			Keterbatasan informasi ketersediaan benih sumber
			Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang popular saja
			Kinerja kelembagaan perbenihan belum optimal
6	Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida	Masih lemahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP)	Keterbatasan pengetahuan petani terhadap dampak jangka panjang akibat pemakaian bahan kimia terus-menerus
7	Belum optimalnya produksi pertanian	Masih rendahnya produktivitas pertanian	Keterbatasan agro input
8	Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan OPT belum optimal	Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa dan kekeringan) serta serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi
		Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal	
9	Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak	Tidak adanya kelembagaan peternakan yang bergerak di bidang penyediaan benih/bibit ternak	Masih rendahnya SDM peternak dalam produksi benih/bibit ternak
10	Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak	Masih tingginya proses perkawinan alami pada ternak.	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan benih ternak unggul.
11	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak	Peternak belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam dan limbah pertanian sebagai pakan ternak.	Terbatasnya SDM peternak dalam pengolahan pakan ternak alternatif.
12	Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis	Minimnya penerapan manajemen resiko pada penyakit ternak	Keterbatasan dukungan anggaran dan SDM
13	Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner	Belum optimalnya penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Nomor Kontrol Veteriner (NKV).	Keterbatasan dukungan anggaran dan SDM.
14	Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian sumber daya genetik Hewan/tanaman.	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelestarian SDG hewan/tanaman.
15	Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian	Belum adanya jaminan pemasaran produksi pertanian.	Adanya kecenderungan petani menanam komoditas yang popular saja.
16	Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan	Masih tingginya suku bunga dan jaminan yang dipersyaratkan oleh perbankan	Ketidakmampuan petani memenuhi syarat mendapatkan kredit dari perbankan.
17	Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani	Keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan petani	Rendahnya tingkat pendidikan petani dan minimnya petani milenial yang berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani
		Formasi petugas yang belum memenuhi kebutuhan	Keterbatasan petugas yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian
18	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan.	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan.
19	Standar kualitas produk pertanian belum memadai	Masih lemahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP)	Keterbatasan kemampuan petani dalam budidaya, panen dan penanganan pasca panen
20	Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	Terbukanya pasar bebas	Daya saing produk sangat rendah
			Tidak adanya jaminan kontiniutas produksi

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

Penjelasan permasalahan yang teridentifikasi pada periode Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Rendahnya Tingkat Pendapatan Petani**

   Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani. Sesuai laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata pendapatan per kapita petani per bulan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.096.372, tahun 2022 sebesar Rp.1.255.288, tahun 2023 sebesar Rp.1.395.192 dan tahun 2024 sebesar Rp.1.395.192. dari data tersebut dapat dilihat ada peningkatan pendapatan petani setiap tahunnya, namun jika dilihat dari tingkat pendapatan petani per harinya masih rendah hanya mencapai Rp.46.506,40 pada tahun 2024. Untuk itu, perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

2. **Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan**

   Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan, banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan dan menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian sangat pesat terutama lahan pertanian yang berada di sepanjang jalan raya.

   Sebagai salah satu upaya menekan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan selain tanaman pangan, diatur dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam perda ini lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 25.219,20 hektar yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

   - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan total luas 17.944,25 hektar;
   - Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan total luas 4.801,88 hektar; dan
   - Lahan Rawan Konversi dengan total luas 2.473,07 hektar.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Pemanfaatan lahan perkarangan sebagai sumber pemenuhan bahan pangan keluarga masih sangat minim sekali. Potensi pemanfaatan lahan perkarangan sebagai sumber pemenuhan bahan pangan keluarga sangat besar sekali di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian

a) Sarana.

Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan melalui kegiatan Brigade Pangan (BP) yang diluncurkan Kementerian Pertanian tahun 2025, Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan sebanyak 54 unit BP yang terdiri dari alsintan pra panen dan pasca panen yang tujuannya mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

b) Prasarana.

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat. Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur.

Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun

waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Pada Tahun 2024, lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan seluas ± 6.492,17 hektar atau sebesar 27,18% dari total luas sawah 23.885,09 hektar (statistik pertanian tahun 2024), artinya masih sangat luas lahan sawah yang belum teraliri air irigasi dengan baik.

5. **Rendahnya Penggunaan Benih Berkualitas Dan Bersertifikat.**

Penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pada tahun 2024 penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat tanaman padi sawah baru mencapai ± 16% dari total luas tanam padi sawah.

Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Perlu optimalisasi sarana dan prasarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat. Berkenaan dengan pengembangan sumberdaya genetik lokal, juga perlu didorong untuk melakukan pemurnian terhadap jenis tanaman tersebut. Sumber daya genetik lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah *Padi Sawah Varietas Bawaan* dan *Jengkol Varietas Bareh Pessel dan Lokal Pessel* yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu jenis tanaman asli lokal asal Kabupaten Pesisir Selatan.

6. **Masih Tingginya Ketergantungan Petani Terhadap Pupuk Anorganik dan Pestisida**

Penggunaan pupuk anorganik rata-rata untuk sekali musim tanam adalah 300 kg/ha dan pemakaian pestisida sebagian besar tidak sesuai anjuran. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang terus meneruskan akan mengakibatkan:

- Pencemaran Air

  Salah satu dampak paling serius dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia adalah pencemaran air. Limbah dari bahan-bahan kimia ini dapat mencemari sumber air seperti sungai dan danau. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem air, tetapi juga membahayakan kehidupan akuatik dan kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut.

- Kehilangan Keanekaragaman Hayati

  Selain dapat mencemari air, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian serangga yang

penting dalam rantai makanan alami. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem alami dan mengurangi keanekaragaman hayati. Penurunan populasi serangga dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pertanian dan lingkungan secara keseluruhan.

- Resistensi Hama dan Gulma

  Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan perkembangan resistensi pada hama dan gulma terhadap pestisida. Akibatnya, petani sering kali harus menggunakan dosis yang lebih tinggi atau jenis pestisida yang lebih kuat untuk mencapai efek yang sama. Ini bukan hanya meningkatkan biaya produksi tetapi juga memberikan tekanan lebih besar pada lingkungan.

- Pengurangan Kesuburan Tanah

  Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tanah. Ini dapat mengurangi kesuburan tanah secara jangka panjang dan menyebabkan degradasi kualitas tanah. Tanah yang kurang subur mempengaruhi produktivitas pertanian dan memerlukan upaya ekstra untuk pemulihan kesuburan.

- Dampak Kesehatan Manusia

  Selain dampak lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Paparan jangka panjang terhadap residu pestisida pada makanan dapat meningkatkan risiko kesehatan manusia. Gangguan hormon, masalah reproduksi, dan risiko terkena kanker merupakan beberapa dampak kesehatan serius yang dapat timbul dari paparan ini. Kesehatan petani dan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia.

Meskipun pupuk dan pestisida kimia memberikan manfaat segera dalam peningkatan hasil panen, dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tidak boleh diabaikan. Petani perlu mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan mempertimbangkan alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Dengan memahami dampak negatif dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi lingkungan, meningkatkan kualitas tanah, dan

menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami pentingnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara bijak, kita dapat mendukung pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan.

7. **Belum Optimalnya Produksi Pertanian**

   Secara umum ada 2 (dua) cara upaya peningkatan produksi pertanian, yaitu (1) Ekstensifikasi Pertanian (peningkatan produksi pertanian dengan cara memperluas areal pertanian, dan (2) Intensifikasi Pertanian (peningkatan produksi pertanian dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada). Upaya intensifikasi salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas padi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 4,69 ton/ha, tahun 2021 sebesar 4,83 ton/ha, tahun 2022 sebesar 5,05 ton/ha, tahun 2023 sebesar 4,93 ton/ha dan tahun 2024 sebesar 4,59 ton/ha.

8. **Terjadinya Gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)**

   Serangan OPT untuk tanaman padi yang paling besar adalah serangan hama wereng dan tikus yang hampir merata di setiap kecamatan. Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petan. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

9. **Terbatasnya Ketersediaan Benih/Bibit Unggul Ternak**

   Setiap tahunnya Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan benih ternak (Frozen Semen/Embrio Sapi) sebanyak ± 10.000 straw dengan jumlah aseptor (sapi indukan) ± 25.000 ekor. Selama ini kebutuhan akan benih ternak tersebut ditunjang bantuan dari Provinsi dan Pusat, rata-rata setiap tahunnya kontribusi provinsi dan pusat adalah sebesar ± 8.000 straw atau hampir 80% dari total kebutuhan per tahunnya. Disamping itu di Kabupaten Pesisir Selatan belum adanya

kelembagaan peternakan yang bergerak dibidang penyediaan benih/bibit unggul ternak.

10. **Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Populasi Ternak**

Ada beberapa upaya peningkatan populasi ternak, yaitu:

- Inseminasi Buatan (IB)

  Kondisi saat ini tingkat kelahiran hasil IB di Kabupaten Pesisir Selatan masih tergolong rendah yaitu dibawah 50%. Merujuk hasil penelitian terhadap sapi bali, rata-rata persentase keberhasilan IB adalah mencapai 66,89%.

- Penanganan Gangguan Reproduksi

  Gangguan reproduksi pada ternak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

  Malnutrisi: Kekurangan mineral seperti selenium yang penting untuk fungsi reproduksi dapat menyebabkan kesulitan dalam proses reproduksi.

  Penyakit Menular: Penyakit seperti IBR, BVD, dan Brucellosis dapat mempengaruhi kualitas sperma dan berahi.

  Stress: Stress panas dan demam juga dapat mempengaruhi kualitas sperma sebelum disimpan untuk ternak.

  Kesehatan Reproduksi: Kesehatan reproduksi yang buruk dapat menyebabkan anestrus dan penurunan fertilitas.

  Manajemen: Buruknya sistem pemeliharaan dan tingkat kegagalan kebuntingan juga dapat menjadi penyebab gangguan reproduksi.

  Dengan memahami faktor-faktor ini, peternak dapat melakukan penanganan yang tepat untuk mencegah gangguan reproduksi dan memastikan kesehatan reproduksi ternak.

- Pengendalian Pemotongan Betina Produktif.

  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 18 ayat 2 menjelaskan bahwa ternak ruminansia besar betina produktif (sapi atau kerbau) dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian penyakit hewan.

11. **Masih Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Produksi Pakan Ternak**

Pakan ternak berkualitas adalah pakan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan spesifik hewan

ternak. Nutrisi utama yang harus ada dalam pakan meliputi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Pada usaha peternakan rakyat, pakan yang diberikan umumnya sesuai dengan kemampuan peternak, bukan sesuai dengan kebutuhan ternaknya.

Pemberian pakan tentu bukan sekedar membuat ternak kenyang, karena kenyang bukanlah standar bahwa kebutuhan nutrisi akan ternak terpenuhi. Rasa kenyang bukan pula hanya berbicara tentang jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak, akan tetapi kandungan nutrien pakan juga sangat berpengaruh. Aktivitas makan oleh ternak berkaitan dengan sistem saraf (neuro system), melibatkan central nervous system (CNS) yang mengontrol tingkat komsumsi energi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan ternak, atau dalam bahasa sederhana ternak tidak akan berhenti makan jika kebutuhan energinya tidak tercukupi. Hal ini berkaitan dengan kualitas pakan karena dengan tersedianya nutrien yang cukup akan dapat memenuhi kebutuhan energi ternak. Di Kabupaten Pesisir Selatan para peternak masih sangat minim penggunaan teknologi fermentasi pakan sebagai cadangan pakan yang berkualitas.

12. **Belum Optimalnya Penanganan Penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) Dan Zoonosis**

Penyakit hewan menular strategis (PHMS) adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tinggi pada hewan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial, serta dapat menular ke manusia. Definisi Zoonosis

Zoonosis adalah jenis penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Zoonosis dapat berasal dari hewan liar, hewan ternak, maupun hewan peliharaan, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Potensi berkembangnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di Kabupaten Pesisir Selatan sangat besar seperti jembrana, LSD, penyakit mulut dan kuku dan rabies.

Tahun 2020 kasus kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis sebanyak 2.194 kasus, tahun 2021 sebanyak 2.743 kasus, tahun 2022 sebanyak 9.925 kasus, tahun 2023 sebanyak 1.860 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1.944 kasus. Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan atas kejadiaan penyakit hewan menular strategis sampai 261,83% jika dibandingkan dengan tahun 2021

karena terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis harus menjadi program prioritas bagi bidang yang menangani kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

13. **Masih Kurangnya Perlindungan Masyarakat Dari Segi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

    Sampai tahun 2024, jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner) di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 (tiga) unit dari total 14 (empat belas) unit usaha. Salah satu faktor belum adanya unit usaha pangan asal hewan yang memiliki Sertifikat NKV yaitu belum adanya Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi syarat untuk penerbitan NKV. Diharapkan dengan telah dibangunnya RPH ini, seluruh unit pangan asal hewan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Sertifikat NKV sampai tahun perencanaan berakhir.

14. **Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman**

    Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah yaitu padi sawah varietas Bawaan, jengkol varietas Lokan Pessel dan Bareh Pessel, sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian sumber daya genetik hewan/tanaman tersebut.

15. **Belum Optimalnya Diversifikasi Pengembangan Usaha Komoditas Pertanian**

    Pengembangan komoditas pertanian menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani dan diversifikasi produk pertanian.

16. **Keterbatasan Akses Petani Terhadap Pembiayaan**

    Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

17. **Terbatasnya Kualitas SDM Petugas Dan Petani Serta Kapasitas Kelembagaan Petani**

    Kualitas sumberdaya manusia petugas masih kurang disamping jumlah pegawai yang terus berkurang, kondisi tahun 2025 jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 84 orang dan diperkirakan sampai tahun 2030 jumlah PPL hanya tinggal 54 orang sehingga luas wilayah Kabupaten yang terdiri atas 182 Nagari tidak seimbang dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada disamping itu juga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur di Kecamatan. Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.

18. **Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan Pertanian dan Pelayanan Kesehatan Hewan**

    Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi dan pelayanan kesehatan hewan kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

19. **Standar Kualitas Produk Pertanian Belum Memadai**

    Saat ini masih banyak produk pertanian yang belum memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh pasar, baik domestik maupun internasional.

20. Persaingan Pasar Dan Ketidakstabilan Harga Produk Pertanian

Sektor pertanian sangat ketat dalam persaingan pasar dengan produk dari daerah lain yang sudah lebih maju dalam proses hilirisasi dan ketidakstabilan harga. dimana fluktuasi harga produk pertanian dapat mempengaruhi keuntungan dari kegiatan hilirisasi.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari penjaringan proses perencanaan serta keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan

   Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kelembagaan yang kokoh dan tata kelola yang baik merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, diharapkan tercipta pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, mampu menghadapi tantangan global, dan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi penggerak pembangunan, tetapi
   juga pelindung hak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
2. Membangun Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

   Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan

berdaya saing. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal keterjangkauan, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan lanjutan, keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, serta kurang optimalnya layanan kesehatan dasar menjadi penghambat peningkatan kualitas SDM. Di sisi lain, tingginya angka stunting dan kurang gizi mencerminkan perlunya intervensi yang lebih serius di sektor kesehatan. Oleh karena itu, membangun SDM yang unggul memerlukan strategi peningkatan mutu pendidikan secara merata dan penguatan layanan kesehatan yang terintegrasi, terjangkau, serta berkelanjutan, guna memastikan setiap warga memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. Produktivitas sektor unggulan menuju agroindustri dan pariwisata untuk ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan

   Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, produktivitas sektor-sektor unggulan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan akses pasar dan teknologi, serta belum optimalnya integrasi hulu-hilir dalam rantai produksi. Di sektor pertanian dan perikanan, praktik tradisional yang belum efisien

   menyebabkan lemahnya daya saing dan ketahanan pangan. Sementara itu, potensi pariwisata alam dan budaya belum dikelola secara maksimal untuk mendorong ekonomi lokal. Oleh karena itu, transformasi menuju agroindustri modern dan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

4. Peningkatan infrastruktur publik untuk menunjang potensi unggulan daerah

   Ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil menengah. Namun, masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi,

yang berdampak langsung pada rendahnya aksesibilitas, efisiensi produksi, serta daya saing produk lokal. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah juga memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur publik yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat diperlukan guna membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis potensi lokal

5. Perhatian terhadap kearifan budaya (ABS-SBK) utnuk generasi muda yang relijius, berbudaya dan tangguh

   Di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, nilai-nilai kearifan lokal seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda. Minimnya internalisasi nilai-nilai adat dan agama dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menyebabkan berkurangnya pemahaman serta pengamalan budaya luhur yang selama ini menjadi jati diri masyarakat Minangkabau. Kondisi ini dikhawatirkan melemahkan karakter generasi muda, baik dalam aspek moral, spiritual, maupun ketangguhan sosial. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dalam mengarusutamakan nilai-nilai ABS-SBK melalui pendidikan karakter, pelestarian seni dan tradisi lokal, serta keteladanan tokoh adat dan agama, agar terbentuk generasi muda yang relijius, berbudaya, dan tangguh menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya

6. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan

   Pembangunan yang berkeadilan harus mampu menjamin partisipasi dan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan di berbagai level. Kelompok disabilitas seringkali terpinggirkan akibat minimnya fasilitas ramah disabilitas, stigma sosial, dan rendahnya dukungan kebijakan. Perempuan juga masih menghadapi hambatan struktural dan budaya yang membatasi peran aktifnya dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendekatan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, melalui kebijakan afirmatif, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, serta pemberdayaan kelompok rentan,

agar pembangunan benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan.

7. Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan ekonomi hijau

   Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan mencakup pemeliharaan ekosistem yang sehat, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan pengendalian dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, sekaligus memberikan layanan ekosistem seperti udara bersih, air yang aman, dan tanah subur. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengadopsi kerangka pembangunan ekonomi hijau, kita tidak hanya menciptakan ekosistem yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Pembangunan ekonomi hijau adalah solusi untuk menghadirkan kemakmuran yang inklusif,keberlanjutan, dan tangguh di masa depan.

8. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan

   Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta kebencanaan adalah upaya strategis yang diperlukan untuk melindungi kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan dari ancaman yang semakin nyata. Perubahan iklim telah membawa berbagai dampak, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca, yang mengancam keberlanjutan hidup di bumi. Dengan mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi dalam setiap aspek pembangunan, kita dapat memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, dan memastikan keberlanjutan hidup manusia serta kelestarian bumi.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra perangkat daerah provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan

untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Pesisir Selatan :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan

teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas**

   Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Sementara itu, integritas menjadi landasan utama dalam setiap proses pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik dijalankan secara jujur, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui penguatan sistem birokrasi, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta

pengembangan budaya kerja yang bersih dan melayani, misi ini diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan menjadi pendorong utama keberhasilan pembangunan daerah.

2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama bagi kemajuan daerah. Misi ini diarahkan pada penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua pilar strategis dalam membentuk manusia yang cerdas, sehat, dan kompetitif. Melalui sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang, mendorong pengembangan karakter, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, melalui sektor kesehatan, upaya difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta penguatan sistem layanan kesehatan yang responsif dan inklusif. Dengan menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, daerah berupaya menciptakan SDM yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan mental, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

3. **Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera**

   Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan

mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan landskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

4. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif**

   Perwujudan misi ini merupakan pondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

5. **Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana**

   Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan

kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu ***"Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas",*** dan misi ketiga yaitu **"*Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera*".** Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pertanian Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

VISI	**:**	**Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan**
MISI 1	**:**	**Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas**
TUJUAN 1.1.	:	Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi
SASARAN 1.1.2.	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing
MISI 3	**:**	**Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera**
TUJUAN 3.1	:	Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
SASARAN 3.1.2	:	Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan

Sesuai dengan misi tersebut di atas, ada isu strategis terkait Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang

harus segera dilaksanakan yaitu : ***"Produktivitas sektor unggulan menuju agroindustri dan pariwisata untuk ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan"***. Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dapat dijabarkan pada Tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

Visi	Misi	Tujuan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan.	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Birokrasi Yang Efisien, Adil, Dan Berkinerja Tinggi	Sistem monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja dinas dan pegawai, belum berjalan optimal	Masih rendahnya SDM ASN	Pendidikan dan latihan bagi ASN
	Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.	Terwujudnya Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif .	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian e. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat f. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida g. Belum optimalnya produksi pertanian h. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) i. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak j. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak k. Masih rendahnya	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang popular saja f. Degradasi sumber daya lahan dan air g. Kurangnya penerapan teknologi pertanian h. Biaya produksi usaha tani masih tinggi i. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim j. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian k. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan h. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam i. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsid j. Kewenangan

			kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak l. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis m. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner n. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman o. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian p. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan q. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani r. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan s. Standar kualitas produk pertanian belum memadai t. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	l. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak m. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis n. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) o. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskeswan maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis p. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal q. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian r. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani s. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang t. Rendahnya kapasitas petugas dan petani u. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan v. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak w. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran x. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan k. Ketersediaan sumber daya pertanian l. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian m. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura n. Sinergisitas antar perangkat daerah o. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat p. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan q. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar r. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek s. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan t. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

B. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional diantaranya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Kondisi pembangunan pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, di samping gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah maka visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah 2025-2029 yakni : **“Pertanian maju berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045”.**

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan pada Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian
Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(3)
Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	a. Meningkatkan kesejahteraan petani b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia *d.* Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia	a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia	a. Meningkatnya pendapatan petani b. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan c. Meningkatnya cadangan pangan nasional d. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian e. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan f. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian g. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertanian sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian;
b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas;
c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat; dan
d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia.

Sasaran strategi yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

a. Meningkatnya pendapatan petani;
b. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan;
c. Meningkatnya cadangan pangan nasional;
d. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian;
e. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan;
f. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian; dan
g. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2025-2029, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dijabarkan pada Tabel 2.14 sebagai berikut :

Tabel 2.14
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Rendahnya tingkat pendapatan petani	Jam kerja petani belum optimal	Optimalisasi jam kerja petani

2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	a. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan c. Terbatasnya sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian d. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat e. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida f. Belum optimalnya produksi pertanian g. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) h. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak i. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak j. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak k. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman l. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian m. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan n. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani o. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian	a. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil b. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif c. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal d. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang popular saja e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Biaya produksi usaha tani masih tinggi h. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim i. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian j. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul k. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak l. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal m. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian n. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani o. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang p. Rendahnya kapasitas petugas dan petani q. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal c. Berkembangnya teknologi pertanian d. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) e. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian f. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan g. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam h. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi i. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan j. Ketersediaan sumber daya pertanian k. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian l. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura m. Sinergisitas antar perangkat daerah n. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat o. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

3	Meningkatnya cadangan pangan nasional	a. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan c. Terbatasnya sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian d. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat e. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida f. Belum optimalnya produksi pertanian g. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) h. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak i. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak j. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak k. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman l. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian m. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan n. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani o. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian	a. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil b. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif c. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal d. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang popular saja e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Biaya produksi usaha tani masih tinggi h. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim i. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian j. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul k. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak l. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal m. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian n. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani o. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang p. Rendahnya kapasitas petugas dan petani q. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal c. Berkembangnya teknologi pertanian d. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) e. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian f. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan g. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam h. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi i. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan j. Ketersediaan sumber daya pertanian k. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian l. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura m. Sinergisitas antar perangkat daerah n. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat o. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

4	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	a. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran b. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian e. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
5	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Standar kualitas produk pertanian belum memadai	a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian b. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
6	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	a. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak	a. Degradasi sumber daya lahan dan air b. Kurangnya penerapan teknologi pertanian c. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
7	Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan	a. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis b. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan hewan	a. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis b. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskeswan maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	a. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

2. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah ***"Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing".*** Sasaran yaitu ***"Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan"***

Strategi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas produksi berbasis kawasan. Fokus pada pengembangan kawasan tanaman pangan, melalui penetapan kawasan komoditi, penguatan korporasi petani, dan integrasi sistem budidaya.
b. Revitalisasi sarana produksi dan infrastruktur pendukung. Meliputi penyediaan benih/bibit unggul bersertifikat, pupuk berimbang, alat mesin pertanian (alsintan), jalan usaha tani, dan irigasi tersier.
c. Modernisasi pertanian dan penguatan SDM petani. Melalui pemberdayaan petani milenial, pelatihan budidaya ramah lingkungan, adopsi teknologi digital, dan penguatan Balai Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan yang tersebar di Kabupaten/Kota
d. Pengembangan kemitraan dan kelembagaan agribisnis. Fasilitasi MoU antara kelompok tani dengan pelaku industri, pelatihan manajemen agribisnis, dan penguatan koperasi tani sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagainya.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 2.15 sebagai berikut :

Tabel 2.15
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian e. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang popular saja	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian

		f. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida g. Belum optimalnya produksi pertanian h. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) i. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman j. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian k. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan l. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani m. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian n. Standar kualitas produk pertanian belum memadai o. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	f. Degradasi sumber daya lahan dan air g. Kurangnya penerapan teknologi pertanian h. Biaya produksi usaha tani masih tinggi i. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim j. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian k. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal l. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian m. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani n. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang o. Rendahnya kapasitas petugas dan petani p. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian q. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak r. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran s. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan h. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam i. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsid j. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan k. Ketersediaan sumber daya pertanian l. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian m. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura n. Sinergisitas antar perangkat daerah o. Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman yang cukup besar p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

3. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah ***"Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan berbasis kelanjutan".*** Sasaran yaitu :

a. Meningkatnya produksi komoditas peternakan; dan
b. Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

Strategi yang diterapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan melalui peningkatan kualitas bibit, peningkatan kualitas pakan, pemanfaatan teknologi reproduksi, peningkatan nilai

tambah produk peternakan dan peningkatan SDM peternakan;

b. Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan strategis dan zoonosis melalui sistem deteksi dini, vaksinasi massal, dan biosekuriti lintas wilayah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.16
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi komoditas peternakan	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian d. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak e. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak g. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan h. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan i. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani j. Standar kualitas produk pertanian belum memadai k. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul h. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak i. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal j. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani k. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang l. Rendahnya kapasitas petugas dan petani m. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran n. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas peternakan h. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas Peternakan i. Ketersediaan sumber daya pertanian j. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian k. Sinergisitas antar perangkat daerah l. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat m. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang cukup besar n. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek o. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

2.	Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	a. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis b. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	a. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis b. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskeswan maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan d. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

C. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima Tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, perangkat daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan mencakup struktur dan Pola Ruang. Rencana Pengembangan Pusat kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. Rencana sistem perkotaan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan kabupaten.

Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) diatas terdiri dari : a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); b. Pusat Kegiatan Kawasan (PKK); dan c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.17
Pengembangan Pusat Kegiatan (PPK) Kabupaten Pesisir Selatan sampai Tahun 2030

PKL*)	PPK	PPL
(1)	(2)	(3)
Painan	Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan
Kambang	Pasar Baru di Kecamatan Bayang	Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Tapan	Inderapura di Kecamatan Pancung Soal	Lumpo di Kecamatan IV. Jurai
	Lunang di Kecamatan Lunang	Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas
		Surantih di Kecamatan Sutera
		Amping Parak di Kecamatan Sutera
		Koto Baru di Kecamatan Lengayang
		Lubuk Sariak di Kecamatang Lengayang
		Lakitan di Kecamatan Lengayang
		Balai Selasa di Kecamatan Ranah Pesisir
		Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti
		Punggasan di Kecamatan Linggo Sari Baganti
		Tamuan di Kecamatan Air Pura
		Muaro Sakai di Kecamatan Pancung Soal
		Pasar Beriang di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
		Sindang di Kecamatan Lunang
		Kumbung di Kecamatan Lunang
		Silaut di Kecamatan Silaut

Keterangan :
PKL: ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Rencana pola ruang di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum meliputi : a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan b. Kawasan Peruntukan Budidaya.

a) Kawasan Peruntukan Lindung terdiri atas :

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat;
- Kawasan konservasi;
- Kawasan lindung geologi;
- Kawasan rawan bencana;
- Kawasan cagar budaya;
- Kawasan ekosistem mangrove; dan
- Kawasan lindung lainnya.

b) Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas :

- Kawasan hutan produksi;
- Kawasan hutan rakyat;
- Kawasan pertanian;
- Kawasan perikanan;
- Kawasan energi dan sumber daya mineral;
- Kawasan pariwisata;
- Kawasan permukiman; dan
- Kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian meliputi:

a. Kawasan tanaman pangan dengan luas 45.291 Ha yang berada pada:
   - Kecamatan Koto XI Tarusan;
   - Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
   - Kecamatan Bayang;
   - Kecamatan IV. Jurai;
   - Kecamatan Batang Kapas;
   - Kecamatan Sutera;
   - Kecamatan Lengayang;
   - Kecamatan Ranah Pesisir;
   - Kecamatan Linggo Sari Baganti;
   - Kecamatan Air Pura;
   - Kecamatan Pancung Soal;
   - Kecamatan BAB Tapan;
   - Kecamatan Rahul Tapan; dan
   - Kecamatan Lunang.
b. Kawasan Hortikultura dengan luas ±33.053 Ha berada pada :
   - Kawasan Batang Kapas;
   - Kawasan Bayang;
   - Kawasan IV. Jurai;
   - Kawasan IV Nagari Bayang Utara;

- Kawasan Koto XI Tarusan;
- Kawasan Lengayang; dan
- Kawasan Sutera.

c. Kawasan Perkebunan dengan luas ±84.802 Ha berada pada sebagian :
   - Kecamatan Air Pura;
   - Kecamatan BAB Tapan;
   - Kecamatan IV. Jurai;
   - Kecamatan Lengayang;
   - Kecamatan Linggo Sari Baganti;
   - Kecamatan Lunang;
   - Kecamatan Pancung Soal;
   - Kecamatan Rahul Tapan;
   - Kecamatan Ranah Pesisir;
   - Kecamatan Silaut; dan
   - Kecamatan Sutera.

d. Kawasan Peternakan untuk pengembangan peternakan dan terintegrasi dengan pola sistem pertanian terpadu yang tersebar pada sebagian:
   - Kecamatan Sutera;
   - Kecamatan Lengayang;
   - Kecamatan Ranah Pesisir;
   - Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan pusat pengembangan di Surantih.

Sesuai dengan pasal 47 ayat (3) tentang indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan meliputi :

1) Pengembangan kawasan tanaman tahunan/ perkebunan;
2) Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/ kawasan yang diprogramkan;
3) Penyusunan rencana teknis bangunan dan insfrastruktur agropolitan;
4) Pembangunan insfrastruktur kawasan; dan
5) Pembangunan pusat agropolitan.

Penetapan kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
7. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan
8. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Berikut ini tabel yang menyajikan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Telaahan RTRW sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.18
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	a. Pengembangan PKL, PKK dan PPL yang memiliki fungsi pelayanan pertanian; dan b. Rencana Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.	Alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif	a. Pertumbuhan penduduk yang setiap Tahun meningkat; b. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan dan permukiman untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian; dan c. Pemanfaatan Penerapan Teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal	a. Dijadikannya RTRW Kabupaten ini sebagai pedoman dalam memenuhi Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk

menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk melihat ringkasan KLHS, implikasi terhadap pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan rekomendasi terhadap perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dijabarkan pada Tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

1. Isu Strategis Terkait TPB

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi KLHS	
	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Belum adanya hilirisasi produk pertanian.	a. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; dan b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota; dan c. Pembengunan Prasarana Pertanian.

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Pessel Tahun 2025-2029

2. Isu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Data dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan DDDTLH tahun 2017, sehingga terdapat beberapa jasa ekosistem yang kurang sesuai dengan kondisi pada saat ini, isu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dijabarkan pada Tabel 2.20 sebagai berikut :

Tabel 2.20
Isu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Isu DDDTLH
1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan 99,66% Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan Belum Terlampaui. Dari total luas Kabupaten Pesisir Selatan 604.815,18 ha, baru sekitar 2.048,06 ha (0,34%) terlampaui yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV. Jurai, Batang Kapas, Lengayang, Ranah Pesisir, dan Linggo Sari Baganti
2. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Pesisir diperoleh estimasi luas lahan sawah setiap tahunnya semakin berkurang, tahun 2045 luas lahan sawah diperkirakan 8.571,80 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahun meningkat. Sehingga dari estimasi tersebut disimpulkan tahun 2035 Kabupaten Pesisir Selatan akan mengalami defisit, sehingga diperlukan upaya tambahan dalam mengendalikan Pembangunan daerah.

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Pessel Tahun 2025-2029

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perpanjangan tangan Kepala Daerah yang mengurusi sub sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Upaya-upaya peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan perlu dilakukan dalam pencapaian target swasembada pangan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk menentukan isu-isu strategis berdasarkan pemetaan permasalahan yang ada dapat dijabarkan pada Tabel 2.21 sebagai berikut :

Tabel 2.21
Pemetaan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Belum adanya hilirisasi produk pertanian	a. Perubahan Iklim b. Ketimpangan ekonomi global	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian indonesia hilirasi perlu dilanjutkan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	
Penerapan teknologi tepat guna yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian.	Rendahnya tingkat pendapatan petan					Peningkatan pendapatan petani
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan					Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan
Ketersediaan anggaran	Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan					Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman sayur, buah dan biofarmaka
Ketersediaan anggaran	Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)					Keterbatasan sarana dan prasarana (infrastruktur)

	Pertanian					pertanian
Adanya Varietas Unggul Nasional Asal Pesisir Selatan yaitu Padi Sawah Varietas Bawaan, Jengkol Bareh dan Jengkol Pessel, serta Durian Ponger	Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat					Peningkatan penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat
SDM Petugas	Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida					Semakin berkurangnya unsur hara dalam tanah
Ketersediaan anggaran	Belum optimalnya produksi pertanian					Rendahnya produktivitas pertanian
Penyusunan program dan kegiatan yang berbasis pertanian berkelanjutan	Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)					Pengendalian Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
Ketersediaan anggaran dan SDM Petugas	Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak					Peningkatan benih/bibit unggul ternak di masyarakat
Ketersediaan anggaran dan SDM Petugas	Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak					Akselerasi peningkatan populasi ternak khususnya pada sapi dengan optimalisasi Inseminasi Buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif
Ketersediaan anggaran dan SDM Petugas	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak					Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak
Ketersediaan anggaran dan SDM Petugas	Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis					Optimalisasi penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis
Ketersediaan anggaran dan SDM Petugas	Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner					Peningkatan perlindungan masyarakat dari segi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Ketersediaan anggaran dan SDM Petugas	Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik					Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman

	Hewan/Tanaman					
Pengembangan komoditas pertanian	Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian					Diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian
Adanya kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan rekomendasi teknis ke lembaga pembiayaan	Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan					Peningkatan akses petani terhadap pembiayaan
Ketersediaan anggaran dan SDM Petugas	Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani					Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani
Ketersediaan anggaran	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan					Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan yang representatif dan strategis
Ketersediaan Anggaran	Standar kualitas produk pertanian belum memadai					Peningkatan kualitas produk pertanian
Menjaga kestabilan harga pasar terhadap produk pertanian	Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian					Stabilitas harga produk pertanian

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Pessel Tahun 2025

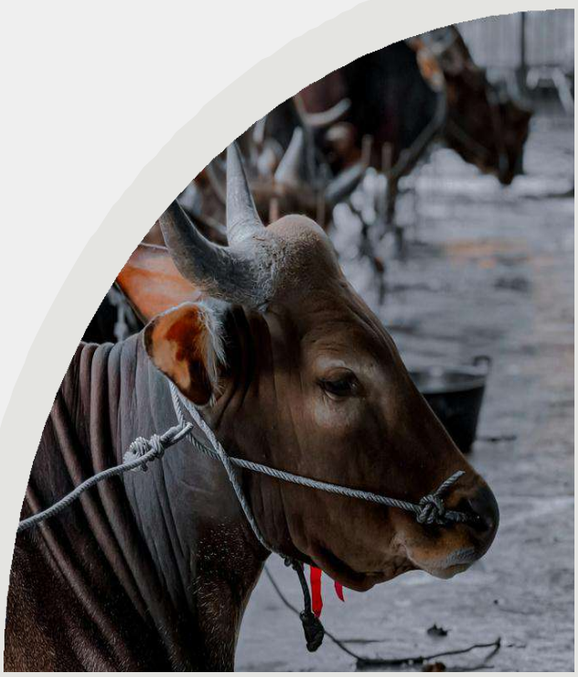

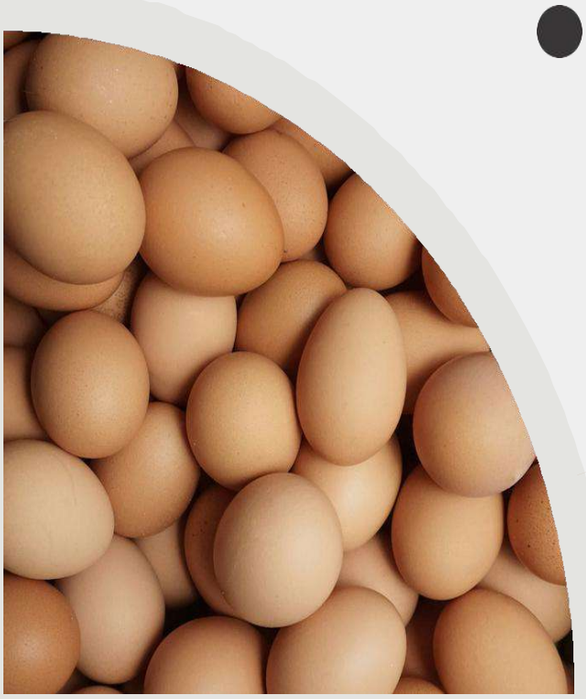

Berpedoman pada arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, capaian kinerja periode sebelumnya, potensi Kabupaten Pesisir Selatan, isu-isu strategis, serta tantangan ke depan selama lima tahun. Sebagaimana diketahui bahwa visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai representasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan gambaran cita-cita, serta harapan masyarakat yang ingin di wujudkan adalah:

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera;
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif; dan
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2030 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disusunlah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan konsep penyusunan sebagaimana pada Gambar 3.1 dibawah ini:

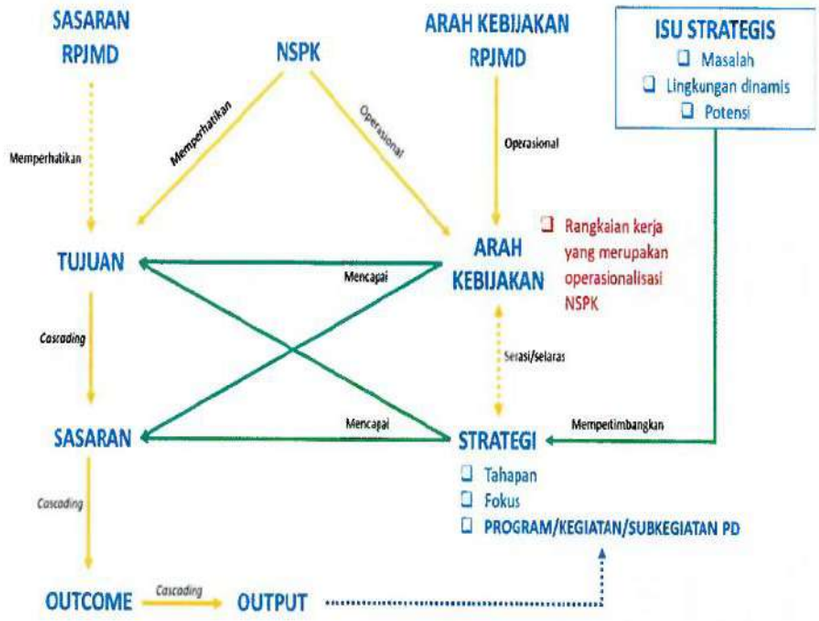

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah

Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (**S**pecific), terukur (**M**easurable), dapat dicapai secara rasional (**A**chiveable), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (**R**elevant), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (**T**ime-bound). yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

1) *Spesific/*Spesifik *(S);* indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
2) *Measurable/*Terukur (M); dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
3) *Achiveable* (A); dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
4) *Result-Oriented/Relevant* (R); terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5) *Time-Bound* (T); memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Analisis Situasi:

   Pahami kondisi saat ini dari Dinas Pertanian, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2) Penetapan Tujuan:

   Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas pertanian yang akan membimbing penetapan target.

3) Tujuan Strategis:

   Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

4) Indikator Kinerja:

   Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

5) Target Spesifik:

   Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6) Rencana Aksi:

   Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

7) Monitoring dan Evaluasi:

   Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Untuk melihat lebih jelasnya keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini:

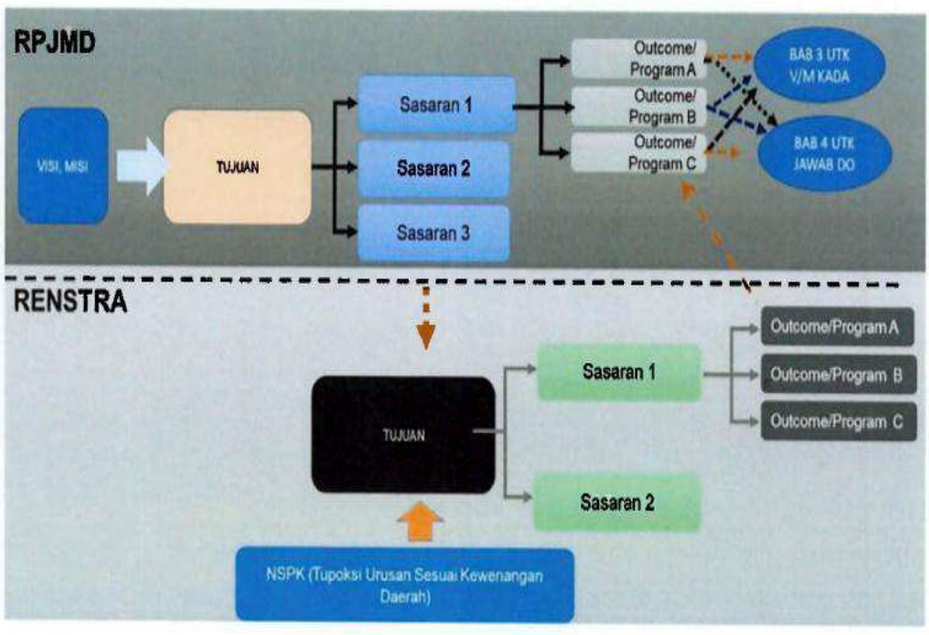

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

Tujuan adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan, sehingga menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Rumusan tujuan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan, yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis permasalahan pembangunan pertanian dan isu-isu strategis yang relevan. Indikator tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang akan dijalankan oleh Dinas Pertanian mengacu pada misi pertama yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas dan ketiga yaitu Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera. Berdasarkan kedua misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berdaya Saing dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani”

3.2. SASARAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran secara terukur dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program/ kegiatan/sub kegiatan. Fokus utama penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Setelah melalui beberapa proses guna menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran di Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
b) Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian

Secara rinci dapat dilihat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN											
- Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berdaya saing dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	0	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	89.50	89.98	90.43	90.88	91.34	91.79	92.25	
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	90	91	92	93	94	95	96	
		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK (Rp)	3.050.000.000.000	3.160.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.239.793.959.885	

3.3. STRATEGI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan pertanian. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholders pembangunan pertanian untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

Visi/Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Penahapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan				
			Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN							
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas							
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berdaya Saing dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas kinerja Aparatur pemerintah yang baik	Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah
MISI 3 : Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera							
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berdaya Saing dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Peningkatan Produksi dan Produktivitas komoditas unggulan sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
			Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, dam parit, embung, pintu air dan sumber-sumber air lainnya guna mendukung produktivitas lahan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, dam parit, embung, pintu air dan sumber-sumber air lainnya guna mendukung produktivitas lahan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, dam parit, embung, pintu air dan sumber-sumber air lainnya guna mendukung produktivitas lahan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, dam parit, embung, pintu air dan sumber-sumber air lainnya guna mendukung produktivitas lahan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, dam parit, embung, pintu air dan sumber-sumber air lainnya guna mendukung produktivitas lahan
			Pengembangan infrastruktur pendukung pangan	Pengembangan infrastruktur pendukung pangan	Pengembangan infrastruktur pendukung pangan	Pengembangan infrastruktur pendukung pangan	Pengembangan infrastruktur pendukung pangan
			Pengembangan komoditi pertanian berbasis	Pengembangan komoditi pertanian	Pengembangan komoditi pertanian	Pengembangan komoditi pertanian berbasis	Pengembangan komoditi pertanian berbasis

			kawasan	berbasis kawasan	berbasis kawasan	kawasan	kawasan
			Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada pelaku utama dalam berusaha tani	Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada pelaku utama dalam berusaha tani	Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada pelaku utama dalam berusaha tani	Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada pelaku utama dalam berusaha tani	Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada pelaku utama dalam berusaha tani
			Pemberdayaan kelompok penangkar benih	Pemberdayaan kelompok penangkar benih	Pemberdayaan kelompok penangkar benih	Pemberdayaan kelompok penangkar benih	Pemberdayaan kelompok penangkar benih
			Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman	Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman	Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman	Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman	Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman
			Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian berbasis teknologi	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian berbasis teknologi	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian berbasis teknologi	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian berbasis teknologi	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian berbasis teknologi
			Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
			Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik	Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik	Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik	Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik	Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
			Pengawasan pupuk bersubsidi	Pengawasan pupuk bersubsidi	Pengawasan pupuk bersubsidi	Pengawasan pupuk bersubsidi	Pengawasan pupuk bersubsidi
			Meningkatkan penyediaan ternak bibit berkualitas dengan cara pengembangan Bibit Sapi Pesisir dan Itik Bayang sebagai Plasma Nutfah Pesisir Selatan, dan pengembangan ternak	Meningkatkan penyediaan ternak bibit berkualitas dengan cara pengembangan Bibit Sapi Pesisir dan Itik Bayang sebagai Plasma Nutfah Pesisir Selatan, dan pengembangan	Meningkatkan penyediaan ternak bibit berkualitas dengan cara pengembangan Bibit Sapi Pesisir dan Itik Bayang sebagai Plasma Nutfah Pesisir Selatan, dan pengembangan	Meningkatkan penyediaan ternak bibit berkualitas dengan cara pengembangan Bibit Sapi Pesisir dan Itik Bayang sebagai Plasma Nutfah Pesisir Selatan, dan pengembangan	Meningkatkan penyediaan ternak bibit berkualitas dengan cara pengembangan Bibit Sapi Pesisir dan Itik Bayang sebagai Plasma Nutfah Pesisir Selatan, dan pengembangan

			bibit ruminansia dan ternak bibit unggas	ternak bibit ruminansia dan ternak bibit unggas	ternak bibit ruminansia dan ternak bibit unggas	ternak bibit ruminansia dan ternak bibit unggas	ternak bibit ruminansia dan ternak bibit unggas
			Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)	Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)	Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)	Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)	Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)
			Penanganan gangguan reproduksi	Penanganan gangguan reproduksi	Penanganan gangguan reproduksi	Penanganan gangguan reproduksi	Penanganan gangguan reproduksi
			Pengendalian pemotongan betina produktif	Pengendalian pemotongan betina produktif	Pengendalian pemotongan betina produktif	Pengendalian pemotongan betina produktif	Pengendalian pemotongan betina produktif
			Meningkatkan penyediaan pakan ternak dengan cara ketersediaan pakan tambahan (konsentrat), formulasi ransum ternak berbasis bahan pakan lokal, dan produksi pakan hasil samping pertanian yang diolah (silase)	Meningkatkan penyediaan pakan ternak dengan cara ketersediaan pakan tambahan (konsentrat), formulasi ransum ternak berbasis bahan pakan lokal, dan produksi pakan hasil samping pertanian yang diolah (silase)	Meningkatkan penyediaan pakan ternak dengan cara ketersediaan pakan tambahan (konsentrat), formulasi ransum ternak berbasis bahan pakan lokal, dan produksi pakan hasil samping pertanian yang diolah (silase)	Meningkatkan penyediaan pakan ternak dengan cara ketersediaan pakan tambahan (konsentrat), formulasi ransum ternak berbasis bahan pakan lokal, dan produksi pakan hasil samping pertanian yang diolah (silase)	Meningkatkan penyediaan pakan ternak dengan cara ketersediaan pakan tambahan (konsentrat), formulasi ransum ternak berbasis bahan pakan lokal, dan produksi pakan hasil samping pertanian yang diolah (silase)
			Peningkatan akses permodalan dan pasar dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani	Peningkatan akses permodalan dan pasar dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani	Peningkatan akses permodalan dan pasar dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani	Peningkatan akses permodalan dan pasar dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani	Peningkatan akses permodalan dan pasar dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani
		Menurunkan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
			Penguatan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penguatan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penguatan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penguatan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penguatan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			Meningkatkan pengawasan obat hewan, sarana dan bahan medik	Meningkatkan pengawasan obat hewan, sarana dan bahan medik	Meningkatkan pengawasan obat hewan, sarana dan bahan medik	Meningkatkan pengawasan obat hewan, sarana dan bahan medik	Meningkatkan pengawasan obat hewan, sarana dan bahan medik

			Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit-unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit-unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit-unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit-unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit-unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
			Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
			Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti
			Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis
		Meningkatkan keamanan pangan asal hewan	Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
		Pemberdayaan petugas, petani dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh
			Peningkatan kapasitas SDM petani dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas SDM petani dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas SDM petani dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas SDM petani dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas SDM petani dan kelembagaan petani
			Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
			Mendorong penumbuhan dan pengembangan petani milenial	Mendorong penumbuhan dan pengembangan petani	Mendorong penumbuhan dan pengembangan petani	Mendorong penumbuhan dan pengembangan petani milenial	Mendorong penumbuhan dan pengembangan petani

				milenial	milenial		milenial
		Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana panen, pascapanen dan pengolahan hasil komoditas pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana panen, pascapanen dan pengolahan hasil komoditas pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana panen, pascapanen dan pengolahan hasil komoditas pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana panen, pascapanen dan pengolahan hasil komoditas pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana panen, pascapanen dan pengolahan hasil komoditas pertanian
			Pemantauan harga komoditi pangan ditingkat petani	Pemantauan harga komoditi pangan ditingkat petani	Pemantauan harga komoditi pangan ditingkat petani	Pemantauan harga komoditi pangan ditingkat petani	Pemantauan harga komoditi pangan ditingkat petani

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

3.4. ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	
2	Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	Penguatan produktivitas dan hilirisasi produk pertanian unggulan daerah Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah Dukungan terhadap pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada pelaku utama dalam berusaha tani	
			Pemberdayaan kelompok penangkar benih	
			Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman	
			Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian berbasis teknologi	
			Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	
			Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik	
			Pengawasan pupuk bersubsidi	
			Meningkatkan penyediaan ternak bibit berkualitas dengan cara pengembangan Bibit Sapi Pesisir dan Itik Bayang sebagai Plasma Nutfah Pesisir Selatan, dan pengembangan ternak bibit ruminansia dan ternak bibit unggas	
			Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)	
			Penanganan gangguan reproduksi	
			Pengendalian pemotongan betina produktif	
			Meningkatkan penyediaan pakan ternak dengan cara ketersediaan pakan tambahan (konsentrat), formulasi ransum ternak berbasis bahan pakan lokal, dan produksi pakan hasil samping pertanian yang diolah (silase)	
			Peningkatan akses permodalan dan pasar dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani	
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular	
			Penguatan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
			Meningkatkan pengawasan obat hewan, sarana dan bahan medik	

			Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit-unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	
			Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	
			Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti	
			Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis	
			Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	
			Peningkatan sarana dan prasarana panen, pascapanen dan pengolahan hasil komoditas pertanian	
			Pemantauan harga komoditi pangan ditingkat petani	
		Aglomerasi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan	Pengembangan komoditi pertanian berbasis kawasan	
		Rehabilitasi jaringan irigasi, saluran air, dan embung untuk mendukung produktivitas lahan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, dam parit, embung, pintu air dan sumber-sumber air lainnya guna mendukung produktivitas lahan	
		Pengembangan infrastruktur pendukung pangan	Pengembangan infrastruktur pendukung pangan	
		Intensifikasi pertanian melalui penerapan LP2B	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	
		Pengembangan petani muda dan sekolah lapang pertanian untuk regenerasi petani	Mendorong penumbuhan dan pengembangan petani milenial	
		Peningkatan kinerja penyuluh	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh	
			Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	
		Pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi pangan	Peningkatan kapasitas SDM petani dan kelembagaan petani	

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome, dan output meliputi program pembangunan pertanian sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan merupakan bagian integral pembangunan pertanian yang pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Untuk teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan kerangka perumusan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana pada Gambar 4.1 dibawah ini:

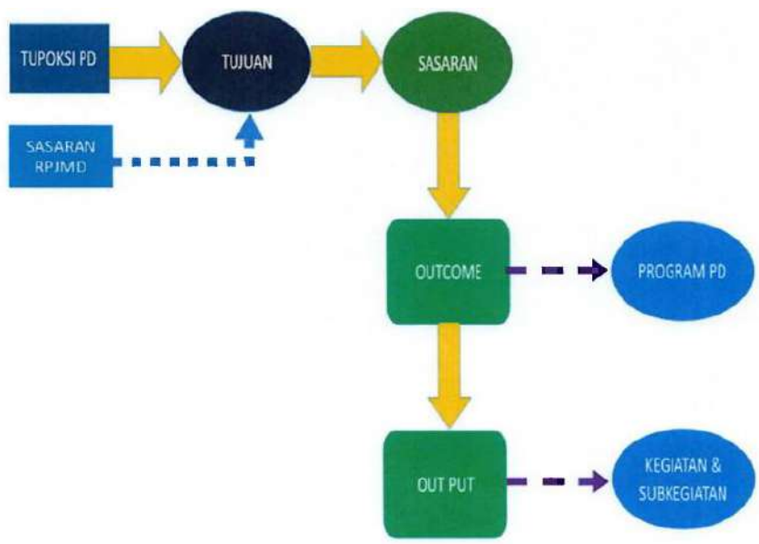

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra perangkat daerah dapat dilihat rumusan program/kegiatan/sub kegiatan lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN							
- Meningkatnya produktivitas dan kualitas oangan - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berdaya saing dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani				Nilai Tukar Petani (NTP)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Inovasi	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3.27.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlindunginya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.27.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.27.01.2.05.0005 - Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi , Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian			Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Indeks Pertanaman	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
				Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	3.27.02.2.04.0002 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
				Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
				Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Terbangunnya prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
					Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kader zoonosis	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
					Jumlah kader zoonosis	3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
					Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
					Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.27.05.2.01.0007 - Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3.27.06.2.01.0001 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	3.27.06.2.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
				Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
					Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.02.0003 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
					Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	
				Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	3.27.06.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.03.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

4.1. PROGRAM DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

Berdasarkan pembahasan tentang teknik merumuskan program/kegiatan/ sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program dalam mencapai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 yang mana program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanian yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2030. Daftar rencana program Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Program Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**44.673.250.695**		**40.786.684.000**		**43.003.106.000**		**45.107.988.000**		**48.261.680.000**	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**19.677.515.695**		**20.666.106.000**		**21.622.924.000**		**22.631.557.000**		**23.695.003.000**	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0.65	0.54	0.50	19.677.515.695	0.50	20.666.106.000	0.50	21.622.924.000	0.50	22.631.557.000	0.50	23.695.003.000	Dinas Pertanian
	Persentase Kinerja Bidang /Sekretariat yang dicapai (%)	85.66	90	91		92		93		94		95		Dinas Pertanian
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	7		7		7		7		7		Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					**6.462.292.000**		**7.058.090.000**		**7.711.897.000**		**8.429.453.000**		**9.217.074.000**	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-15.58	2	2	6.462.292.000	2	7.058.090.000	2	7.711.897.000	2	8.429.453.000	2	9.217.074.000	Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	13.67	0.5	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	2.67	2.80	3.10		3.20		3.30		3.40		3.50		Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	-27.75	1	1.5		2		2		2		2		Dinas Pertanian
	Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	56.92	58.06	59.22		60.40		61.61		62.84		64.10		Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					**12.700.000.000**		**7.218.500.000**		**6.903.775.000**		**7.107.498.000**		**7.331.512.000**	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	22746.10	22746.10	22746.10	12.700.000.000	22746.10	7.218.500.000	22746.10	6.903.775.000	22746.10	7.107.498.000	22746.10	7.331.512.000	Dinas Pertanian
	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22746.10	22746.10	22746.10		22746.10		22746.10		22746.10		22746.10		Dinas Pertanian
	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	25	500	500		500		500		500		500		Dinas Pertanian
	Indeks Pertanaman (Angka)	1.70	1.80	1.85		1.90		1.93		1.95		2		Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					**1.247.000.000**		**1.344.200.000**		**1.449.744.000**		**1.564.395.000**		**1.689.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	100	100	1.247.000.000	100	1.344.200.000	100	1.449.744.000	100	1.564.395.000	100	1.689.000.000	Dinas Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2.05	3.55	3.69		3.83		3.98		4.14		4.32		Dinas Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	21.43	21.43	28.57		35.71		42.86		50		57.14		Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					**267.693.000**		**294.463.000**		**323.909.000**		**356.300.000**		**391.930.000**	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	267.693.000	100	294.463.000	100	323.909.000	100	356.300.000	100	391.930.000	Dinas Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					**97.750.000**		**112.525.000**		**123.777.000**		**129.497.000**		**142.446.000**	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	97.750.000	100	112.525.000	100	123.777.000	100	129.497.000	100	142.446.000	Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					**4.221.000.000**		**4.092.800.000**		**4.867.080.000**		**4.889.288.000**		**5.794.715.000**	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	6.98	13.10	20.78	4.221.000.000	29.17	4.092.800.000	38.81	4.867.080.000	53.45	4.889.288.000	66.67	5.794.715.000	Dinas Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80	80	80		80		80		80		83.33		Dinas Pertanian
	Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					**44.673.250.695**		**40.786.684.000**		**43.003.106.000**		**45.107.988.000**		**48.261.680.000**	

4.2. KEGIATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

Berdasarkan pembahasan tentang teknik merumuskan program/kegiatan/ sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 yang mana kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanian yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2030. Daftar rencana kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**44.673.250.695**		**40.786.684.000**		**43.003.106.000**		**45.107.988.000**		**48.261.680.000**	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**19.677.515.695**		**20.666.106.000**		**21.622.924.000**		**22.631.557.000**		**23.695.003.000**	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,65	0,54	0,50	19.677.515.695	0,50	20.666.106.000	0,50	21.622.924.000	0,50	22.631.557.000	0,50	23.695.003.000	Dinas Pertanian
	Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	85,66	90	91		92		93		94		95		
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	7		7		7		7		7		
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					76.000.000		83.600.000		91.960.000		101.156.000		111.268.000	
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4	76.000.000	4	83.600.000	4	91.960.000	4	101.156.000	4	111.268.000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	19	19		19		19		19		19		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	6		6		6		6		7		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.145.165.695		16.952.633.000		17.800.496.000		18.690.774.000		19.625.593.000	
Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	16.145.165.695	1	16.952.633.000	1	17.800.496.000	1	18.690.774.000	1	19.625.593.000	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	13		13		13		13		13		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	178	158	146		144		140		131		127		
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60.000.000		61.000.000		62.100.000		63.310.000		64.641.000	
Terlindunginya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1	60.000.000	1	61.000.000	1	62.100.000	1	63.310.000	1	64.641.000	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					44.600.000		49.060.000		53.966.000		59.362.000		65.297.000	
Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	146	44.600.000	144	49.060.000	140	53.966.000	131	59.362.000	127	65.297.000	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					451.400.000		482.040.000		515.744.000		552.818.000		593.599.000	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	451.400.000	1	482.040.000	1	515.744.000	1	552.818.000	1	593.599.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					350.465.000		314.109.000		329.815.000		346.305.000		363.621.000	
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	2	350.465.000	2	314.109.000	2	329.815.000	2	346.305.000	2	363.621.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	37		37		33		33		33		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	10		8		8		8		8		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.821.270.000		1.836.276.000		1.852.151.000		1.868.951.000		1.886.736.000	
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1.821.270.000	1	1.836.276.000	1	1.852.151.000	1	1.868.951.000	1	1.886.736.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					728.615.000		887.388.000		916.692.000		948.881.000		984.248.000	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	2	728.615.000	2	887.388.000	2	916.692.000	2	948.881.000	2	984.248.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210	160	210		210		210		210		210		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	60	112		112		112		112		112		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	2		2		2		2		2		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					**6.462.292.000**		**7.058.090.000**		**7.711.897.000**		**8.429.453.000**		**9.217.074.000**	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-15,58	2	2	6.462.292.000	2	7.058.090.000	2	7.711.897.000	2	8.429.453.000	2	9.217.074.000	Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	13,67	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	2,67	2,80	3,10		3,20		3,30		3,40		3,50		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	-27,75	1	1,5		2		2		2		2		
	Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	56,92	58,06	59,22		60,40		61,61		62,84		64,10		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					4.477.292.000		4.925.020.000		5.417.522.000		5.959.275.000		6.555.201.000	
Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	1	4.477.292.000	1	4.925.020.000	1	5.417.522.000	1	5.959.275.000	1	6.555.201.000	
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0	0	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	0	0	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	0	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	
Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	0	0	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	2	2		2		2		2		2		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		36.465.000	
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	0	0	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000	
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.304.000		48.620.000	
Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	0	0	1	40.000.000	1	42.000.000	1	44.100.000	1	46.304.000	1	48.620.000	
	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	0	0	1		1		1		1		1		
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.069.000.000		1.170.650.000		1.282.202.000		1.404.633.000		1.539.019.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	0	0	10.000	1.069.000.000	10.000	1.170.650.000	10.000	1.282.202.000	10.000	1.404.633.000	10.000	1.539.019.000	
	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					696.000.000		723.920.000		753.498.000		784.863.000		818.154.000	
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	0	15	696.000.000	15	723.920.000	15	753.498.000	15	784.863.000	15	818.154.000	
	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	900	1450	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					**12.700.000.000**		**7.218.500.000**		**6.903.775.000**		**7.107.498.000**		**7.331.512.000**	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	22.746,10	22.746,10	22.746,10	12.700.000.000	22.746,10	7.218.500.000	22.746,10	6.903.775.000	22.746,10	7.107.498.000	22.746,10	7.331.512.000	Dinas Pertanian
	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,10	22.746,10	22.746,10		22.746,10		22.746,10		22.746,10		22.746,10		
	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	25	500	500		500		500		500		500		
	Indeks Pertanaman (Angka)	1,70	1,80	1,85		1,90		1,93		1,95		2		
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian					2.120.000.000		1.922.000.000		2.089.200.000		2.273.120.000		2.475.432.000	
Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	1	2.120.000.000	1	1.922.000.000	1	2.089.200.000	1	2.273.120.000	1	2.475.432.000	
	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1		
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	0	0	1		1		1		1		1		
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0	1		0		0		0		0		
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0	1		0		0		0		0		
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0	22.832		22.832		22.832		22.832		22.832		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian					10.450.000.000		5.155.000.000		4.660.500.000		4.666.550.000		4.673.205.000	
Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	1	10.450.000.000	1	5.155.000.000	1	4.660.500.000	1	4.666.550.000	1	4.673.205.000	
	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0		1		0		0		0		
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	2	20		20		20		20		20		
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	1		1		1		1		1		
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	1	10		10		10		10		10		
3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					130.000.000		141.500.000		154.075.000		167.828.000		182.875.000	
Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	0	0	1	130.000.000	1	141.500.000	1	154.075.000	1	167.828.000	1	182.875.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					**1.247.000.000**		**1.344.200.000**		**1.449.744.000**		**1.564.395.000**		**1.689.000.000**	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	100	100	1.247.000.000	100	1.344.200.000	100	1.449.744.000	100	1.564.395.000	100	1.689.000.000	Dinas Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2,05	3,55	3,69		3,83		3,98		4,14		4,32		
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	21,43	21,43	28,57		35,71		42,86		50		57,14		
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					462.000.000		504.200.000		550.420.000		601.051.000		656.525.000	
Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	0	1	462.000.000	1	504.200.000	1	550.420.000	1	601.051.000	1	656.525.000	
	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15	0	15		15		15		15		15		
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	0	15		15		15		15		15		
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	0	42		35		35		35		35		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					120.000.000		126.000.000		132.300.000		138.915.000		145.860.000	
Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	0	0	1	120.000.000	0	126.000.000	1	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.000	
	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah					350.000.000		367.500.000		385.874.000		405.164.000		425.426.000	
Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	0	1	350.000.000	1	367.500.000	1	385.874.000	1	405.164.000	1	425.426.000	
	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	0	1		1		1		1		1		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					315.000.000		346.500.000		381.150.000		419.265.000		461.189.000	
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	0	1	315.000.000	1	346.500.000	1	381.150.000	1	419.265.000	1	461.189.000	
	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	0	100		100		100		100		100		
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	0	0	50		50		50		50		50		
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0	5		5		5		5		5		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					**267.693.000**		**294.463.000**		**323.909.000**		**356.300.000**		**391.930.000**	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	267.693.000	100	294.463.000	100	323.909.000	100	356.300.000	100	391.930.000	Dinas Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					267.693.000		294.463.000		323.909.000		356.300.000		391.930.000	
Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	0	1	267.693.000	1	294.463.000	1	323.909.000	1	356.300.000	1	391.930.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	0	50		50		50		50		50		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	7.619	0	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					**97.750.000**		**112.525.000**		**123.777.000**		**129.497.000**		**142.446.000**	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	97.750.000	100	112.525.000	100	123.777.000	100	129.497.000	100	142.446.000	Dinas Pertanian
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					49.250.000		54.175.000		59.592.000		58.896.000		64.786.000	
Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	0	0	1	49.250.000	1	54.175.000	1	59.592.000	1	58.896.000	1	64.786.000	
	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	2		2		1		0		0		
	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	9		9		9		9		9		
	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	121	141	141		141		141		141		141		
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					36.000.000		44.600.000		49.060.000		53.964.000		59.360.000	
Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	0	0	5	36.000.000	5	44.600.000	5	49.060.000	5	53.964.000	5	59.360.000	
	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	0	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	0	0	10		10		10		10		10		
3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan					12.500.000		13.750.000		15.125.000		16.637.000		18.300.000	
Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0	15	12.500.000	15	13.750.000	15	15.125.000	15	16.637.000	15	18.300.000	
	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	0	0	2		2		2		2		2		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					**4.221.000.000**		**4.092.800.000**		**4.867.080.000**		**4.889.288.000**		**5.794.715.000**	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	6,98	13,10	20,78	4.221.000.000	29,17	4.092.800.000	38,81	4.867.080.000	53,45	4.889.288.000	66,67	5.794.715.000	Dinas Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80	80	80		80		80		80		83,33		
	Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					4.221.000.000		4.092.800.000		4.867.080.000		4.889.288.000		5.794.715.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	0	1	4.221.000.000	1	4.092.800.000	1	4.867.080.000	1	4.889.288.000	1	5.794.715.000	
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	38	0	11		11		11		11		11		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	0	78		63		63		63		63		
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	50		50		50		50		50		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.350	1.115	1.459		1.500		1.550		1.600		1.700		
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	0	15		15		15		15		15		
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	15	15		15		15		15		15		
					44.673.250.695		**40.786.684.000**		**43.003.106.000**		**45.107.988.000**		**48.261.680.000**	

4.3. SUB KEGIATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

Berdasarkan pembahasan tentang teknik merumuskan program/kegiatan/ sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 yang mana kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanian yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2030. Daftar rencana sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Rencana Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**19.867.774.341,00**		**44.673.250.695,00**		**40.786.684.000,00**		**43.003.106.000,00**		**45.107.988.000,00**		**48.261.680.000,00**		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**18.176.667.037,00**		**19.677.515.695,00**		**20.666.106.000,00**		**21.622.924.000,00**		**22.631.557.000,00**		**23.695.003.000,00**		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,65	0,54	18.176.667.037,00	0,50	19.677.515.695,00	0,50	20.666.106.000,00	0,50	21.622.924.000,00	0,50	22.631.557.000,00	0,50	23.695.003.000,00	Dinas Pertanian	
	Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	85,66	90		91		92		93		94		95			
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1		7		7		7		7		7			
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				370.849.200,00		76.000.000,00		83.600.000,00		91.960.000,00		101.156.000,00		111.268.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	370.849.200,00	4	76.000.000,00	4	83.600.000,00	4	91.960.000,00	4	101.156.000,00	4	111.268.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	19		19		19		19		19		19			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		7			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		1		1		1		1		1			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.598.750,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	16.598.750,00	6	15.000.000,00	6	16.500.000,00	6	18.150.000,00	6	19.965.000,00	7	21.961.000,00		
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.664.000,00		7.000.000,00		7.700.000,00		8.470.000,00		9.317.000,00		10.248.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.664.000,00	1	7.000.000,00	1	7.700.000,00	1	8.470.000,00	1	9.317.000,00	1	10.248.000,00		
3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.664.000,00		7.000.000,00		7.700.000,00		8.470.000,00		9.317.000,00		10.248.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.664.000,00	1	7.000.000,00	1	7.700.000,00	1	8.470.000,00	1	9.317.000,00	1	10.248.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.894.950,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4.894.950,00	4	5.000.000,00	4	5.500.000,00	4	6.050.000,00	4	6.655.000,00	4	7.320.000,00		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				336.027.500,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	19	336.027.500,00	19	20.000.000,00	19	22.000.000,00	19	24.200.000,00	19	26.620.000,00	19	29.282.000,00		
3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	-	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		7.000.000,00		7.700.000,00		8.470.000,00		9.317.000,00		10.248.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	-	1	7.000.000,00	1	7.700.000,00	1	8.470.000,00	1	9.317.000,00	1	10.248.000,00		
3.27.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				-		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.000,00		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.379.823.945,00		16.145.165.695,00		16.952.633.000,00		17.800.496.000,00		18.690.774.000,00		19.625.593.000,00		
Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	16.379.823.945,00	1	16.145.165.695,00	1	16.952.633.000,00	1	17.800.496.000,00	1	18.690.774.000,00	1	19.625.593.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13		13			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	178	158		146		144		140		131		127			
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.017.029.695,00		16.016.405.695,00		16.817.225.000,00		17.658.087.000,00		18.540.991.000,00		19.468.041.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	178	158	16.017.029.695,00	146	16.016.405.695,00	144	16.817.225.000,00	140	17.658.087.000,00	131	18.540.991.000,00	127	19.468.041.000,00		
3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				358.676.000,00		124.560.000,00		130.788.000,00		137.327.000,00		144.193.000,00		151.403.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	358.676.000,00	1	124.560.000,00	1	130.788.000,00	1	137.327.000,00	1	144.193.000,00	1	151.403.000,00		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.118.250,00		4.200.000,00		4.620.000,00		5.082.000,00		5.590.000,00		6.149.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	4.118.250,00	13	4.200.000,00	13	4.620.000,00	13	5.082.000,00	13	5.590.000,00	13	6.149.000,00		
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.865.225,00		60.000.000,00		61.000.000,00		62.100.000,00		63.310.000,00		64.641.000,00		
Terlindunginya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	24.865.225,00	1	60.000.000,00	1	61.000.000,00	1	62.100.000,00	1	63.310.000,00	1	64.641.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
3.27.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				24.865.225,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	24.865.225,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.047.862,00		44.600.000,00		49.060.000,00		53.966.000,00		59.362.000,00		65.297.000,00		
Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	8.047.862,00	146	44.600.000,00	144	49.060.000,00	140	53.966.000,00	131	59.362.000,00	127	65.297.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1			
3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.879.200,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	2.879.200,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.000,00		
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.168.662,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	5.168.662,00	5	25.000.000,00	5	27.500.000,00	5	30.250.000,00	5	33.275.000,00	5	36.602.000,00		
3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		14.600.000,00		16.060.000,00		17.666.000,00		19.432.000,00		21.375.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	146	14.600.000,00	144	16.060.000,00	140	17.666.000,00	131	19.432.000,00	127	21.375.000,00		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				120.249.772,00		451.400.000,00		482.040.000,00		515.744.000,00		552.818.000,00		593.599.000,00		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	120.249.772,00	1	451.400.000,00	1	482.040.000,00	1	515.744.000,00	1	552.818.000,00	1	593.599.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				5.663.552,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		16.105.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.663.552,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00	1	16.105.000,00		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.952.680,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	34.952.680,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.260.340,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.260.340,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.000,00		
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000,00		5.400.000,00		5.940.000,00		6.534.000,00		7.187.000,00		7.906.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	5.400.000,00	3	5.400.000,00	3	5.940.000,00	3	6.534.000,00	3	7.187.000,00	3	7.906.000,00		
3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.300.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.300.000,00	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	19.965.000,00	12	21.961.000,00		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.355.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	61.355.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1	366.025.000,00		
3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.318.200,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	3.318.200,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350.465.000,00		314.109.000,00		329.815.000,00		346.305.000,00		363.621.000,00		
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	28.175.000,00	2	350.465.000,00	2	314.109.000,00	2	329.815.000,00	2	346.305.000,00	2	363.621.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		37		37		33		33		33			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		10		8		8		8		8			
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.000,00		60.775.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	50.000.000,00	2	52.500.000,00	2	55.125.000,00	2	57.881.000,00	2	60.775.000,00		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		146.972.000,00		154.320.000,00		162.036.000,00		170.138.000,00		178.645.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	37	146.972.000,00	37	154.320.000,00	33	162.036.000,00	33	170.138.000,00	33	178.645.000,00		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.175.000,00		153.493.000,00		107.289.000,00		112.654.000,00		118.286.000,00		124.201.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	28.175.000,00	10	153.493.000,00	8	107.289.000,00	8	112.654.000,00	8	118.286.000,00	8	124.201.000,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.104.416.033,00		1.821.270.000,00		1.836.276.000,00		1.852.151.000,00		1.868.951.000,00		1.886.736.000,00		
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.104.416.033,00	1	1.821.270.000,00	1	1.836.276.000,00	1	1.852.151.000,00	1	1.868.951.000,00	1	1.886.736.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.930.000,00		151.270.000,00		159.026.000,00		167.189.000,00		175.781.000,00		184.826.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	133.930.000,00	1	151.270.000,00	1	159.026.000,00	1	167.189.000,00	1	175.781.000,00	1	184.826.000,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				970.486.033,00		1.670.000.000,00		1.677.250.000,00		1.684.962.000,00		1.693.170.000,00		1.701.910.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	970.486.033,00	1	1.670.000.000,00	1	1.677.250.000,00	1	1.684.962.000,00	1	1.693.170.000,00	1	1.701.910.000,00		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.240.000,00		728.615.000,00		887.388.000,00		916.692.000,00		948.881.000,00		984.248.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	140.240.000,00	2	728.615.000,00	2	887.388.000,00	2	916.692.000,00	2	948.881.000,00	2	984.248.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210	160		210		210		210		210		210			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	60		112		112		112		112		112			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		2		2		2		2		2			
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.690.000,00		40.915.000,00		41.173.000,00		41.471.000,00		41.813.000,00		42.207.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	40.690.000,00	1	40.915.000,00	1	41.173.000,00	1	41.471.000,00	1	41.813.000,00	1	42.207.000,00		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.200.000,00		574.800.000,00		578.520.000,00		582.642.000,00		587.210.000,00		592.275.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210	160	91.200.000,00	210	574.800.000,00	210	578.520.000,00	210	582.642.000,00	210	587.210.000,00	210	592.275.000,00		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.350.000,00		35.900.000,00		37.695.000,00		39.579.000,00		41.558.000,00		43.636.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	60	8.350.000,00	112	35.900.000,00	112	37.695.000,00	112	39.579.000,00	112	41.558.000,00	112	43.636.000,00		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		62.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	2	62.000.000,00	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	242.000.000,00	2	266.200.000,00		
3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		15.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	2	15.000.000,00	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	36.300.000,00	2	39.930.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				**128.110.150,00**		**6.462.292.000,00**		**7.058.090.000,00**		**7.711.897.000,00**		**8.429.453.000,00**		**9.217.074.000,00**		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-15,58	2	128.110.150,00	2	6.462.292.000,00	2	7.058.090.000,00	2	7.711.897.000,00	2	8.429.453.000,00	2	9.217.074.000,00	Dinas Pertanian	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	13,67	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	2,67	2,80		3,10		3,20		3,30		3,40		3,50			
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	-27,75	1		1,5		2		2		2		2			
	Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	56,92	58,06		59,22		60,40		61,61		62,84		64,10			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				70.000.000,00		4.477.292.000,00		4.925.020.000,00		5.417.522.000,00		5.959.275.000,00		6.555.201.000,00		
Terlaksanya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	70.000.000,00	1	4.477.292.000,00	1	4.925.020.000,00	1	5.417.522.000,00	1	5.959.275.000,00	1	6.555.201.000,00		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	0	0		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	0	0		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0		30		30		30		30		30			
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0		2		2		2		2		2			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	0	0		5		5		5		5		5			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				70.000.000,00		2.812.462.000,00		3.093.708.000,00		3.403.079.000,00		3.743.387.000,00		4.117.726.000,00		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	70.000.000,00	1	2.812.462.000,00	1	3.093.708.000,00	1	3.403.079.000,00	1	3.743.387.000,00	1	4.117.726.000,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0		78.000.000,00		85.800.000,00		94.380.000,00		103.818.000,00		114.199.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0	0	2	78.000.000,00	2	85.800.000,00	2	94.380.000,00	2	103.818.000,00	2	114.199.000,00		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				0		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0	0	30	100.000.000,00	30	110.000.000,00	30	121.000.000,00	30	133.100.000,00	30	146.410.000,00		
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				0		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan				0		287.665.000,00		316.431.000,00		348.074.000,00		382.882.000,00		421.170.000,00		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	0	0	0	1	287.665.000,00	1	316.431.000,00	1	348.074.000,00	1	382.882.000,00	1	421.170.000,00		
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				0		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	0	0	0	6.000	100.000.000,00	6.000	110.000.000,00	6.000	121.000.000,00	6.000	133.100.000,00	6.000	146.410.000,00		
3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				0		60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00		
Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	0	0	0	6.000	60.000.000,00	6.000	66.000.000,00	6.000	72.600.000,00	6.000	79.860.000,00	6.000	87.846.000,00		
3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				0		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				0		404.165.000,00		444.581.000,00		489.039.000,00		537.943.000,00		591.737.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	0	0	1	404.165.000,00	1	444.581.000,00	1	489.039.000,00	1	537.943.000,00	1	591.737.000,00		
3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				0		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00	1	51.243.000,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				28.110.150,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	0	0	28.110.150,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00		
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	2		2		2		2		2		2			
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				28.110.150,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)	2	2	28.110.150,00	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000,00	2	133.100.000,00	2	146.410.000,00		
3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan				0		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.000,00		36.465.000,00		
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.000,00	1	36.465.000,00		
3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.000,00		36.465.000,00		
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.000,00	1	36.465.000,00		
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				0		40.000.000,00		42.000.000,00		44.100.000,00		46.304.000,00		48.620.000,00		
Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	0	0	0	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	1	44.100.000,00	1	46.304.000,00	1	48.620.000,00		
	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	0	0		1		1		1		1		1			
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.000,00		36.465.000,00		
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.000,00	1	36.465.000,00		
3.27.02.2.04.0002 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan				0		10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.000,00		12.155.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	0	0	0	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.000,00	1	12.155.000,00		
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		1.069.000.000,00		1.170.650.000,00		1.282.202.000,00		1.404.633.000,00		1.539.019.000,00		
Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	0	0	0	10.000	1.069.000.000,00	10.000	1.170.650.000,00	10.000	1.282.202.000,00	10.000	1.404.633.000,00	10.000	1.539.019.000,00		
	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan				0		75.000.000,00		78.750.000,00		82.687.000,00		86.821.000,00		91.162.000,00		
Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	0	0	0	10.000	75.000.000,00	10.000	78.750.000,00	10.000	82.687.000,00	10.000	86.821.000,00	10.000	91.162.000,00		
3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.000,00		36.465.000,00		
Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.000,00	1	36.465.000,00		
3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				0		964.000.000,00		1.060.400.000,00		1.166.440.000,00		1.283.084.000,00		1.411.392.000,00		
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	0	0	0	1	964.000.000,00	1	1.060.400.000,00	1	1.166.440.000,00	1	1.283.084.000,00	1	1.411.392.000,00		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				30.000.000,00		696.000.000,00		723.920.000,00		753.498.000,00		784.863.000,00		818.154.000,00		
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	0	30.000.000,00	15	696.000.000,00	15	723.920.000,00	15	753.498.000,00	15	784.863.000,00	15	818.154.000,00		
	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0		10		10		10		10		10			
	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	900	1450		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0	0	10	100.000.000,00	10	110.000.000,00	10	121.000.000,00	10	133.100.000,00	10	146.410.000,00		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		396.000.000,00		403.920.000,00		411.998.000,00		420.238.000,00		428.643.000,00		
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	0	0	15	396.000.000,00	15	403.920.000,00	15	411.998.000,00	15	420.238.000,00	15	428.643.000,00		
3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				30.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.000,00		
Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	900	1450	30.000.000,00	10.000	200.000.000,00	10.000	210.000.000,00	10.000	220.500.000,00	10.000	231.525.000,00	10.000	243.101.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**970.967.800,00**		**12.700.000.000,00**		**7.218.500.000,00**		**6.903.775.000,00**		**7.107.498.000,00**		**7.331.512.000,00**		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	22.746,10	22.746,10	970.967.800,00	22.746,10	12.700.000.000,00	22.746,10	7.218.500.000,00	22.746,10	6.903.775.000,00	22.746,10	7.107.498.000,00	22.746,10	7.331.512.000,00	Dinas Pertanian	
	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,10	22.746,10		22.746,10		22.746,10		22.746,10		22.746,10		22.746,10			
	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	25	500		500		500		500		500		500			
	Indeks Pertanaman (Angka)	1,70	1,80		1,85		1,90		1,93		1,95		2			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				670.967.800,00		2.120.000.000,00		1.922.000.000,00		2.089.200.000,00		2.273.120.000,00		2.475.432.000,00		
Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	670.967.800,00	1	2.120.000.000,00	1	1.922.000.000,00	1	2.089.200.000,00	1	2.273.120.000,00	1	2.475.432.000,00		
	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0		2		2		2		2		2			
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1			
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1			
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0		1		0		0		0		0			
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0		1		0		0		0		0			
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0		22.832		22.832		22.832		22.832		22.832			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				670.967.800,00		120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		175.692.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	670.967.800,00	1	120.000.000,00	1	132.000.000,00	1	145.200.000,00	1	159.720.000,00	1	175.692.000,00		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				0		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0	0	22.832	50.000.000,00	22.832	55.000.000,00	22.832	60.500.000,00	22.832	66.550.000,00	22.832	73.205.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				0		450.000.000,00		495.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		658.845.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	2	450.000.000,00	2	495.000.000,00	2	544.500.000,00	2	598.950.000,00	2	658.845.000,00		
3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				0		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				0		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				0		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				0		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				0		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				0		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota				0		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0	0	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				300.000.000,00		10.450.000.000,00		5.155.000.000,00		4.660.500.000,00		4.666.550.000,00		4.673.205.000,00		
Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	300.000.000,00	1	10.450.000.000,00	1	5.155.000.000,00	1	4.660.500.000,00	1	4.666.550.000,00	1	4.673.205.000,00		
	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		1		0		0		0			
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		5		5		5		5		5			
	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	2		20		20		20		20		20			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		2		2		2		2		2			
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		2		2		2		2		2			
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0		1		1		1		1		1			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	1		10		10		10		10		10			
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				0		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	1	100.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				0		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				0		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.500.000,00	5	66.550.000,00	5	73.205.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				0		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				0		0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				200.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	2	200.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00		
3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan				0		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				0		6.000.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0	1	6.000.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0		130.000.000,00		141.500.000,00		154.075.000,00		167.828.000,00		182.875.000,00		
Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	0	0	0	1	130.000.000,00	1	141.500.000,00	1	154.075.000,00	1	167.828.000,00	1	182.875.000,00		
	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				0		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	0	0	0	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.000,00		36.465.000,00		
Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.000,00	1	36.465.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				**24.469.910,00**		**1.247.000.000,00**		**1.344.200.000,00**		**1.449.744.000,00**		**1.564.395.000,00**		**1.689.000.000,00**		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	100	24.469.910,00	100	1.247.000.000,00	100	1.344.200.000,00	100	1.449.744.000,00	100	1.564.395.000,00	100	1.689.000.000,00	Dinas Pertanian	
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2,05	3,55		3,69		3,83		3,98		4,14		4,32			
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	21,43	21,43		28,57		35,71		42,86		50		57,14			
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				24.469.910,00		462.000.000,00		504.200.000,00		550.420.000,00		601.051.000,00		656.525.000,00		
Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	0	24.469.910,00	1	462.000.000,00	1	504.200.000,00	1	550.420.000,00	1	601.051.000,00	1	656.525.000,00		
	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15	0		15		15		15		15		15			
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	0		15		15		15		15		15			
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	0		42		35		35		35		35			
3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				0		45.000.000,00		49.500.000,00		54.450.000,00		59.895.000,00		65.884.000,00		
Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15	0	0	15	45.000.000,00	15	49.500.000,00	15	54.450.000,00	15	59.895.000,00	15	65.884.000,00		
3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				0		42.000.000,00		46.200.000,00		50.820.000,00		55.902.000,00		61.492.000,00		
Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	0	0	42	42.000.000,00	35	46.200.000,00	35	50.820.000,00	35	55.902.000,00	35	61.492.000,00		
3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0		45.000.000,00		49.500.000,00		54.450.000,00		59.895.000,00		65.884.000,00		
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	0	0	15	45.000.000,00	15	49.500.000,00	15	54.450.000,00	15	59.895.000,00	15	65.884.000,00		
3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.000,00		36.465.000,00		
Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.000,00	1	36.465.000,00		
3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				0		50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.000,00		60.775.000,00		
Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.000,00	1	60.775.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.469.910,00		250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	24.469.910,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1	366.025.000,00		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				0		120.000.000,00		126.000.000,00		132.300.000,00		138.915.000,00		145.860.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	0	0	0	1	120.000.000,00	0	126.000.000,00	1	132.300.000,00	1	138.915.000,00	1	145.860.000,00		
	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.000,00		
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.750,00	1	36.465.000,00		
3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.000,00		
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.750,00	1	36.465.000,00		
3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.000,00		
Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.750,00	1	36.465.000,00		
3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				0		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.000,00		
Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.750,00	1	36.465.000,00		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		350.000.000,00		367.500.000,00		385.874.000,00		405.164.000,00		425.426.000,00		
Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	0	0	1	350.000.000,00	1	367.500.000,00	1	385.874.000,00	1	405.164.000,00	1	425.426.000,00		
	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	0		1		1		1		1		1			
3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				0		175.000.000,00		183.750.000,00		192.937.000,00		202.580.000,00		212.713.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	0	0	1	175.000.000,00	1	183.750.000,00	1	192.937.000,00	1	202.580.000,00	1	212.713.000,00		
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0		175.000.000,00		183.750.000,00		192.937.000,00		202.584.000,00		212.713.000,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	0	0	1	175.000.000,00	1	183.750.000,00	1	192.937.000,00	1	202.584.000,00	1	212.713.000,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		315.000.000,00		346.500.000,00		381.150.000,00		419.265.000,00		461.189.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	0	0	1	315.000.000,00	1	346.500.000,00	1	381.150.000,00	1	419.265.000,00	1	461.189.000,00		
	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	0		100		100		100		100		100			
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0		2		2		2		2		2			
	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	0	0		50		50		50		50		50			
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0		30		30		30		30		30			
	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0		5		5		5		5		5			
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.000,00		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	0	0	1	75.000.000,00	1	82.500.000,00	1	90.750.000,00	1	99.825.000,00	1	109.807.000,00		
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.000,00		
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	0	0	1	75.000.000,00	1	82.500.000,00	1	90.750.000,00	1	99.825.000,00	1	109.807.000,00		
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				0		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.000,00		
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0	0	5	15.000.000,00	5	16.500.000,00	5	18.150.000,00	5	19.965.000,00	5	21.961.000,00		
3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				0		20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	0	0	0	50	20.000.000,00	50	22.000.000,00	50	24.200.000,00	50	26.620.000,00	50	29.282.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan				0		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0	0	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	36.300.000,00	2	39.930.000,00	2	43.923.000,00		
3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				0		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	0	0	100	75.000.000,00	100	82.500.000,00	100	90.750.000,00	100	99.825.000,00	100	109.807.000,00		
3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				0		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				0		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.000,00		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0	0	30	15.000.000,00	30	16.500.000,00	30	18.150.000,00	30	19.965.000,00	30	21.961.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				**0**		**267.693.000,00**		**294.463.000,00**		**323.909.000,00**		**356.300.000,00**		**391.930.000,00**		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	0	100	267.693.000,00	100	294.463.000,00	100	323.909.000,00	100	356.300.000,00	100	391.930.000,00	Dinas Pertanian	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				0		267.693.000,00		294.463.000,00		323.909.000,00		356.300.000,00		391.930.000,00		
Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	0	0	1	267.693.000,00	1	294.463.000,00	1	323.909.000,00	1	356.300.000,00	1	391.930.000,00		
	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	0		50		50		50		50		50			
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	7.619	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0		153.193.000,00		171.013.000,00		190.739.000,00		212.571.000,00		237.496.000,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	7.619	0	0	5.000	153.193.000,00	5.000	171.013.000,00	5.000	190.739.000,00	5.000	212.571.000,00	5.000	237.496.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0		50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.880.000,00		60.000.000,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	0	0	50	50.000.000,00	50	52.500.000,00	50	55.125.000,00	50	57.880.000,00	50	60.000.000,00		
3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				0		32.250.000,00		35.475.000,00		39.022.500,00		42.924.500,00		47.217.000,00		
Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	0	0	1	32.250.000,00	1	35.475.000,00	1	39.022.500,00	1	42.924.500,00	1	47.217.000,00		
3.27.05.2.01.0007 - Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan		0	0	0		32.250.000,00		35.475.000,00		39.022.500,00		42.924.500,00		47.217.000,00		
Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	0	0	0	1	32.250.000,00	1	35.475.000,00	1	39.022.500,00	1	42.924.500,00	1	47.217.000,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				**33.296.226,00**		**97.750.000,00**		**112.525.000,00**		**123.777.000,00**		**129.497.000,00**		**142.446.000,00**		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	33.296.226,00	100	97.750.000,00	100	112.525.000,00	100	123.777.000,00	100	129.497.000,00	100	142.446.000,00	Dinas Pertanian	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				33.296.226,00		49.250.000,00		54.175.000,00		59.592.000,00		58.896.000,00		64.786.000,00		
Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	0	0	33.296.226,00	1	49.250.000,00	1	54.175.000,00	1	59.592.000,00	1	58.896.000,00	1	64.786.000,00		
	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0		2		2		1		0		0			
	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0		9		9		9		9		9			
	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	121	141		141		141		141		141		141			
3.27.06.2.01.0001 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				0		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	0	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	1	6.050.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				0		11.250.000,00		12.375.000,00		13.612.000,00		14.973.000,00		16.471.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	0	9	11.250.000,00	9	12.375.000,00	9	13.612.000,00	9	14.973.000,00	9	16.471.000,00		
3.27.06.2.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak				0		3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.000,00		
terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	0	0	0	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.630.000,00	1	3.993.000,00	1	4.392.000,00		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				33.296.226,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	121	141	33.296.226,00	141	30.000.000,00	141	33.000.000,00	141	36.300.000,00	141	39.930.000,00	141	43.923.000,00		
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0		36.000.000,00		44.600.000,00		49.060.000,00		53.964.000,00		59.360.000,00		
Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	0	0	0	5	36.000.000,00	5	44.600.000,00	5	49.060.000,00	5	53.964.000,00	5	59.360.000,00		
	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0		30		30		30		30		30			
	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	0	0		10		10		10		10		10			
	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0		0		1		1		1		1			
	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	0	0		10		10		10		10		10			
3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.000,00		10.980.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	0	0	0	5	7.500.000,00	5	8.250.000,00	5	9.075.000,00	5	9.982.000,00	5	10.980.000,00		
3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan				0		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.000,00		10.980.000,00		
Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	0	0	0	10	7.500.000,00	10	8.250.000,00	10	9.075.000,00	10	9.982.000,00	10	10.980.000,00		
3.27.06.2.02.0003 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan				0		13.500.000,00		14.850.000,00		16.335.000,00		17.968.000,00		19.765.000,00		
Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0	0	30	13.500.000,00	30	14.850.000,00	30	16.335.000,00	30	17.968.000,00	30	19.765.000,00		
3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan				0		0,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		
Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00		
3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan				0		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.000,00		10.980.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	0	0	0	10	7.500.000,00	10	8.250.000,00	10	9.075.000,00	10	9.982.000,00	10	10.980.000,00		
3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				0		12.500.000,00		13.750.000,00		15.125.000,00		16.637.000,00		18.300.000,00		
Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0	0	15	12.500.000,00	15	13.750.000,00	15	15.125.000,00	15	16.637.000,00	15	18.300.000,00		
	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	0	0		2		2		2		2		2			
3.27.06.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				0		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	0	0	0	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	6.050.000,00	2	6.655.000,00	2	7.320.000,00		
3.27.06.2.03.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				0		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.000,00		10.980.000,00		
Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	0	0	15	7.500.000,00	15	8.250.000,00	15	9.075.000,00	15	9.982.000,00	15	10.980.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				**534.263.218,00**		**4.221.000.000,00**		**4.092.800.000,00**		**4.867.080.000,00**		**4.889.288.000,00**		**5.794.715.000,00**		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	6,98	13,10	534.263.218,00	20,78	4.221.000.000,00	29,17	4.092.800.000,00	38,81	4.867.080.000,00	53,45	4.889.288.000,00	66,67	5.794.715.000,00	Dinas Pertanian	
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80	80		80		80		80		80		83,33			
	Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100	100		100		100		100		100		100			
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				534.263.218,00		4.221.000.000,00		4.092.800.000,00		4.867.080.000,00		4.889.288.000,00		5.794.715.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	0	534.263.218,00	1	4.221.000.000,00	1	4.092.800.000,00	1	4.867.080.000,00	1	4.889.288.000,00	1	5.794.715.000,00		
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	0		5		5		5		5		5			
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	38	0		11		11		11		11		11			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	0		78		63		63		63		63			
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0		50		50		50		50		50			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.350	1.115		1.459		1.500		1.550		1.600		1.700			
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	0		15		15		15		15		15			
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	15		15		15		15		15		15			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				431.562.200,00		1.091.000.000,00		1.200.100.000,00		1.320.110.000,00		1.452.121.000,00		1.597.333.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	15	431.562.200,00	15	1.091.000.000,00	15	1.200.100.000,00	15	1.320.110.000,00	15	1.452.121.000,00	15	1.597.333.000,00		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				102.701.018,00		1.675.000.000,00		1.457.500.000,00		1.998.250.000,00		1.763.575.000,00		2.386.432.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.350	1.115	102.701.018,00	1.459	1.675.000.000,00	1.500	1.457.500.000,00	1.550	1.998.250.000,00	1.600	1.763.575.000,00	1.700	2.386.432.000,00		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0		318.000.000,00		214.500.000,00		235.950.000,00		259.545.000,00		285.499.000,00		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	0	0	78	318.000.000,00	63	214.500.000,00	63	235.950.000,00	63	259.545.000,00	63	285.499.000,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				0		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		805.255.000,00		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	38	0	0	11	550.000.000,00	11	605.000.000,00	11	665.500.000,00	11	732.050.000,00	11	805.255.000,00		
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				0		152.000.000,00		167.200.000,00		183.920.000,00		202.312.000,00		222.543.000,00		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	0	50	152.000.000,00	50	167.200.000,00	50	183.920.000,00	50	202.312.000,00	50	222.543.000,00		
3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				0		375.000.000,00		382.500.000,00		390.750.000,00		399.825.000,00		409.807.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	0	0	15	375.000.000,00	15	382.500.000,00	15	390.750.000,00	15	399.825.000,00	15	409.807.000,00		
3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				0		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	0	0	5	30.000.000,00	5	33.000.000,00	5	36.300.000,00	5	39.930.000,00	5	43.923.000,00		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				0		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	0	0	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00		
JUMLAH				**19.867.774.341,00**		**44.673.250.695,00**		**40.786.684.000,00**		**43.003.106.000,00**		**45.107.988.000,00**		**48.261.680.000,00**		

4.4. KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Prioritas Daerah yaitu program yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun.

Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah. Patut disadari bahwa program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renstra ini, bukanlah domain tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, namun hanya bersifat stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu sinergi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
			3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
			3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
			3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
			3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
			3.27.02.2.04.0002 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
			3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
			3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
			3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
			3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
			3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	
			3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
3.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
			3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
			3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
			3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
			3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
			3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
			3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	
			3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
			3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
			3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
4.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0007 - Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
5.	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			3.27.06.2.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	
			3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
			3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
			3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
			3.27.06.2.02.0003 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
			3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	
			3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
			3.27.06.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
			3.27.06.2.03.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
6.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
			3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

4.5. PROGRAM PRO RAKYAT (PROGRAM UNGGULAN BUPATI-WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE TAHUN 2025-2029)

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut :

Sumber : RPJMD Kab. Pessel Tahun 2025-2029

Gambar 4.2
Lima Program Pro Rakyat Tahun 2025-2029

Dari kelima program Pro Rakyat diatas, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mendukung program unggulan yang pertama yaitu **"Nagari Kanyang** dan **Nagari Sejahtera".** Program Pro Rakyat tersebut disinkronkan dengan misi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Program Pro Rakyat Tahun 2025-2030

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Misi	Program Unggulan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nagari Kanyang	Memperkuat basis agrikultur/ pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	Misi 3 : Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk masyarakat yang sejahtera	1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 4. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 5. Perizinan usaha pertanian 6. Penyuluhan pertanian	**Aksi :** 1. Gerakan tanam padi serentak 2. Jumlah lahan yang ditanami 3. Budidaya komoditi unggulan: a) Manggis b) Durian premium c) Kopi d) Kelapa dalam 4. Budidaya tanaman pangan lainnya: a) Jagung b) Kacang tanah c) Pisang 5. Budidaya sumber pangan hewani: sapi, ayam, telur: a) Sapi (pengadaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan) b) Budidaya Itik Bayang (pemberdayaan kelompok penangkar Itik Bayang) 6. Hilirisasi hasil pertanian: a) Pemantapan plakat ke sawah per nagari b) Pemeliharaan irigasi tersier c) Petani Muda Penggarap (1000 org selama 5 tahun)
2	Nagari Sejahtera			1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Kawasan Sentra Usaha Budidaya (Durian Premium, Jagung, Kelapa Dalam, Atsiri; 2026 fokus utk Durian Premium)

Sumber : RPJMD Kab. Pessel Tahun 2025-2029

Dukungan pelaksanaan Program Pro Rakyat dapat disajikan pada Tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Satuan	Target						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nagari Kanyang	Gerakan tanam padi serentak	Kali	IP 2	IP 2	IP 2	IP 2	IP 3	IP 3	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**0**	**520.000.000**	**551.000.000**	**584.050.000**	**619.302.500**	**656.922.625**
										1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**0**	**520.000.000**	**551.000.000**	**584.050.000**	**619.302.500**	**656.922.625**
										1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500	510.512.625
										1.2. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
										2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	**28.110.150**	**100.000.000**	**110.000.000**	**121.000.000**	**133.100.000**	**146.410.000**
										2.1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	28.110.150	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
										Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**0**	**153.193.000**	**171.013.000**	**190.739.000**	**212.571.000**	**237.496.000**
										1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**0**	**153.193.000**	**171.013.000**	**190.739.000**	**212.571.000**	**237.496.000**
										1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	153.193.000	171.013.000	190.739.000	212.571.000	237.496.000
		Jumlah lahan yang ditanami (Serentak)	Ha	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**0**	**520.000.000**	**551.000.000**	**584.050.000**	**619.302.500**	**656.922.625**
										1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**0**	**520.000.000**	**551.000.000**	**584.050.000**	**619.302.500**	**656.922.625**
										1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500	510.512.625
										1.2. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
										2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	**28.110.150**	**100.000.000**	**110.000.000**	**121.000.000**	**133.100.000**	**146.410.000**
										2.1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	28.110.150	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000

No	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Satuan	Target						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**0**	**153.193.000**	**171.013.000**	**190.739.000**	**212.571.000**	**237.496.000**
										1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**0**	**153.193.000**	**171.013.000**	**190.739.000**	**212.571.000**	**237.496.000**
										1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	153.193.000	171.013.000	190.739.000	212.571.000	237.496.000
		Budidaya Komoditi Unggulan:														
										Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	**975.000.000**	**1.143.610.000**	**1.304.073.600**	**1.464.431.324**	**1.624.787.266**
										1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0	**975.000.000**	**1.143.610.000**	**1.304.073.600**	**1.464.431.324**	**1.624.787.266**
		- Manggis	Ha	0	30	35	40	45	50	1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	250.000.000	287.500.000	322.875.000	358.228.750	393.582.288
		- Durian premium	Ha	25 Ha (APBD Prov)	30	35	40	45	50	1.2. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	325.000.000	359.610.000	391.316.100	422.993.161	454.669.932
		- Kopi	Ha	0	20	25	30	35	40	1.3. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	300.000.000	376.500.000	451.882.500	527.259.413	602.636.297
		- Kelapa dalam	Ha	0	20	25	30	35	40	1.4. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	100.000.000	120.000.000	138.000.000	155.950.000	173.898.750
		Budidaya tanaman pangan lainnya:														
										Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**-**	**575.000.000**	**803.250.000**	**1.155.588.750**	**1.507.919.794**	**1.815.250.796**
										1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**-**	**575.000.000**	**803.250.000**	**1.155.588.750**	**1.507.919.794**	**1.815.250.796**
		- Jagung	Ha	10.000 Ha (APBN)	100	150	200	250	300	1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	200.000.000	299.500.000	397.995.000	496.479.950	549.964.800
		- Kacang tanah	Ha	0	5	10	15	20	25	1.2. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	50.000.000	103.750.000	157.593.750	211.439.844	265.285.996
		- Pisang	Ha	1 Ha (APBN)	5	10	15	20	25	1.3. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	325.000.000	400.000.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000

No	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Satuan	Target						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Budidaya sumber pangan hewani: sapi, ayam dan telur:														
										Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**30.000.000**	**200.000.000**	**210.000.000**	**220.500.000**	**231.525.000**	**243.101.000**
										1. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**30.000.000**	**200.000.000**	**210.000.000**	**220.500.000**	**231.525.000**	**243.101.000**
		- Sapi (pengadaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan)	Dosis	1.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.1. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	30.000.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.000
										Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**0**	**50.000.000**	**55.000.000**	**60.500.000**	**66.550.000**	**73.205.000**
										1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	**0**	**50.000.000**	**55.000.000**	**60.500.000**	**66.550.000**	**73.205.000**
		- Budidaya Itik Bayang (pemberdayaan kelompok penangkar Itik Bayang)	Kelompok	0	10	10	10	10	10	1.1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	0	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
		Hilirisasi hasil pertanian:														
										Program Penyuluhan Pertanian						
										1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
		- Pemantapan plakat ke sawah per nagari	Nagari	172	172	172	172	172	172	1.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	101.821.168	155.000.000	170.500.000	187.550.000	206.305.000	226.935.500
		- Petani muda penggarap (1000 orang selama 5 tahun)	Orang	825	850	900	925	950	1.000	1.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	40.202.800	400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	585.640.000
2	Nagari Sejahtera	Pembangunan kawasan sentra usaha budidaya (durian premium, jagung, kelapa dalam, atsiri; 2026 fokus untuk durian premium)	Kawasan	0	1	2	3	4	4	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**0**	**325.000.000**	**359.610.000**	**391.316.100**	**422.993.161**	**454.669.932**
										1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**0**	**325.000.000**	**359.610.000**	**391.316.100**	**422.993.161**	**454.669.932**
										1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	325.000.000	359.610.000	391.316.100	422.993.161	454.669.932

4.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode 2025-2030 tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Penyajian IKU dan IKD dalam dokumen Renstra menjadi pijakan dalam penyusunan target pembangunan tahunan dan sekaligus memenuhi aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara detil target IKU dan IKD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN									
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	89,50	89,98	90,43	90,88	91,34	91,79	92,25	
3.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	90	91	92	93	94	95	96	
4.	Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK	Rp	3.050.000.000.000	3.160.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.239.793.959.885	

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN										
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Angka	38.844	41.108	41.583	42.058	42.533	43.008	43.483	
2	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	%	36.54	34.35	34.21	34.06	33.92	33.77	33.63	

4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										
2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	negatif	%	2.02	3.55	3.69	3.83	3.98	4.41	4.32	
3.	Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun	positif	Kw/ha	56.92	58.06	59.22	60.40	61.61	62.84	64.10	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Tahunan maupun lima Tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian serta populasi ternak terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan mengakomodir Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2024-2029, Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dan dokumen hasil KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024-2029.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan aplikasi dari semangat dan tekad kinerja yang dituangkan dalam visi, misi dan tujuan pembangunan pertanian yang mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra yang telah disusun ini juga merupakan pedoman bagi sekretariat dan bidang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Renja, RKA yang dibutuhkan sebagai pendukung terlaksananya Renstra Tahun 2025-2029.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Sekretariat dan bidang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2) Seluruh aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3) Renstra selanjutnya dijabarkan dalan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga kosistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra; dan
4) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

META DATA

RENSTRA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nama Indikator	:	Nilai Tukar Petani (NTP).
Level Dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Tujuan.
Definisi	:	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani (IT)}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani (IB)}} \times 100$
Satuan Hasil	:	Indeks.
Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Dinas Pertanian.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran.
Definisi	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah penilaian terhadap rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Rumus Perhitungan	:	Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Satuan Hasil	:	Angka.
Sumber Data	:	Inspektorat Daerah.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Dinas Pertanian.

3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran.
Definisi	:	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk

di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.
Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Rumus Perhitungan : Hasil penilaian inovasi pada aplikasi IGA.
Satuan Hasil : Angka.
Sumber Data : Aplikasi IGA.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian.

4. Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK

Nama Indikator : Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK.
Level Dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran.
Definisi : Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.
Rumus Perhitungan : Jumlah total nilai PDRB per sub sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk rupiah yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan lainnya, perkebunan tahunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan.
Satuan Hasil : Rupiah (Rp.)
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian.

5. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator : Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah penilaian terhadap rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukan peningkatan nilai AKIP Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun N terhadap capaian nilai AKIP tahun N-1.
Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Nilai AKIP tahun N - nilai AKIP tahun N-1}}{\text{Nilai AKIP tahun N-1}} \times 100\%$
Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Inspektorat Daerah.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian.

6. Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat Yang Dicapai

Nama Indikator : Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat Yang Dicapai.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Kinerja adalah ukuran atau evaluasi terhadap hasil atau prestasi seseorang, kelompok, atau organisasi

dalam mencapai tujuan atau target tertentu.
Persentase kinerja bidang/sekretariat yang dicapai adalah hasil evaluasi terhadap hasil atau prestasi bidang/sekretariat dalam mencapai tujuan atau target kinerja yang telah ditentukan.

Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Capaian kinerja bidang/sekretariat}}{\text{Target kinerja bidang/sekretariat}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

7. Jumlah Inovasi

Nama Indikator : Jumlah Inovasi.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Jumlah Inovasi Dinas Pertanian adalah inovasi yang disusun oleh seluruh esselon III di Dinas Pertanian dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Dinas Pertanian yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.
Rumus Perhitungan : Jumlah Inovasi setiap esselon III.
Satuan Hasil : Inovasi.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat dan Bidang.

8. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Nama Indikator : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produksi tanaman pangan yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari komoditas tanaman pangan utama yang terdiri dari padi dan jagung yang diukur dalam satuan ton.
Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun N - produksi tanaman pangan tahun N-1}}{\text{Produksi tanaman pangan tahun N-1}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

9. Peningkatan Produksi Hortikultura

Nama Indikator : Peningkatan Produksi Hortikultura.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produksi hortikultura yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari tanaman hortikultura yang meliputi komoditas sayuran yaitu cabe merah, bawang merah dan buah-buahan yaitu jeruk, pisang, durian, manggis dan jengkol dalam satuan ton.
Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Produksi hortikultura tahun N - produksi hortikultura tahun N-1}}{\text{Produksi hortikultura tahun N-1}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.

Frekuensi ; Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

10. Peningkatan Produksi Perkebunan

Nama Indikator : Peningkatan Produksi Perkebunan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produksi perkebunan adalah hasil panen bersih dari komoditas perkebunan dalam satuan ton yang meliputi kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, gambir dan pala.
Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Produksi perkebunan tahun N - produksi perkebunan tahun N-1}}{\text{Produksi perkebunan tahun N-1}} \times 100\%$
Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Perkebunan.

11. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

Nama Indikator : Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produksi komoditas peternakan yang dimaksud adalah hasil panen dari budidaya ternak yang terdiri dari daging dan telur yaitu daging ruminansia yang meliputi sapi, kerbau dan kambing, daging unggas meliputi ayam dan itik dan telur meliputi telur ayam dan itik.
Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N - produksi komoditas peternakan tahun N-1}}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N-1}} \times 100\%$
Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Peternakan.

12. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Nama Indikator : Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produktivitas pertanian per hektar per tahun adalah ukuran yang menunjukkan jumlah hasil panen yang dihasilkan dari setiap hektar lahan pertanian dalam satu tahun.
Produktivitas ini mencerminkan efisiensi penggunaan lahan dalam menghasilkan produk pertanian dan merupakan indikator penting dalam pertanian untuk mengukur kinerja dan efisiensi produksi. Produktivitas yang dihitung adalah padi sawah dan jagung.
Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah total produksi pertanian utama (padi dan jagung) tahun N}}{\text{Luas panen (padi dan jagung) tahun N}}$
Satuan Hasil : Kwintal per hektar (Kw/ha).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

13. Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B

Nama Indikator	:	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Lahan adalah bagian daratan permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B yang dimaksud adalah total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	:	Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang ditetapkan.
Satuan Hasil	:	Hektar (Ha).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

14. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Nama Indikator	:	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Lahan adalah bagian daratan permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam

merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Rumus Perhitungan	:	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Satuan Hasil	:	Hektar (Ha).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

15. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan. Luas Layanan Irigasi yaitu luas persawahan yang mendapatkan air melalui aset jaringan irigasi yang bersangkutan.
Rumus Perhitungan	:	Total luas lahan sawah yang terlayani dari dampak rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Hektar (Ha).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

16. Indeks Pertanaman

Nama Indikator	:	Indeks Pertanaman.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Indeks pertanaman per tahun adalah perbandingan luas areal tanam terhadap luas areal lahan yang dimiliki selama beberapa kali tanam dalam setahun.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Luas tanam padi sawah tahun N}}{\text{Luas lahan sawah tahun N}}$
Satuan Hasil	:	Angka.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

17. Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Nama Indikator	:	Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) dijumpai dalam Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
Sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/ 2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebagai berikut Anthrax, Rabies, Salmonellosis (unggas), Brucellosis, Avian Influenza, Porcine Reproductiue and Respiratory Syndrome, Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis/ Infectious, Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV), Leptospirosis, Jembrana, Surra/Trypanosomiasis, Hog Cholera/Classical Swine Fever, Penyakit Mulut dan Kuku/Foot and Mouth Disease, Lumpy Skin Disease, African Swine Fever (ASF), Bouine Viral Diarrhea, Zoonotic Coronavirus, Zoonotic Tuberculosis, Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE), Rift Valley Fever (RVF), dan Peste des Petits Ruminants (PPR).
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis adalah proporsi wilayah yang mendapatkan tindakan penanganan/intervensi.

Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun N}}{\text{Luas wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

18. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Nama Indikator : Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) dijumpai dalam Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
Sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/ 2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebagai berikut Anthrax, Rabies, Salmonellosis (unggas), Brucellosis, Avian Influenza, Porcine Reproductiue and Respiratory Syndrome, Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis/ Infectious, Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV), Leptospirosis,

Jembrana, Surra/Trypanosomiasis, Hog Cholera/Classical Swine Fever, Penyakit Mulut dan Kuku/Foot and Mouth Disease, Lumpy Skin Disease, African Swine Fever (ASF), Bouine Viral Diarrhea, Zoonotic Coronavirus, Zoonotic Tuberculosis, Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE), Rift Valley Fever (RVF), dan Peste des Petits Ruminants (PPR).

Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah proporsi pengendalian penyakit hewan menular strategis yang mendapatkan tindakan penanganan/intervensi.

Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah pengendalian kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun N}}{\text{Jumlah kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun N}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%).

Sumber Data : Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

19. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Nama Indikator : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular.

Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.

Definisi : Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular adalah ukuran yang menunjukkan persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini merupakan indikator penting dalam pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular.

Penghitungan indikator ini adalah penjumlahan kejadian PHMS dan PHM Non Strategis. Daftar PHM Non Strategis sebagai berikut Abses, Acariasis, Actinobacillosis, Actinomycosis, Akabane, Anaplasmosis, Aspergillosis, Avian spirochaetosis, Babesiosis, Balantidiasis, White Scour Disease, Bovine Ephemeral Fever, Canine Infectious, Tracheobronchitis, Chlamydiasis, Coccidiosis, Corynebacteriosis, Infectious Coryza, Chronic

Respiratory Disease, Cryptosporidiosis, Demodecosis, Dermatophytosis, Dermatophylosis, Duck Viral Enteritis, Duck Viral Hepatitis, Egg Drop Syndrome, Enterotoxemia, Enterovirus encephalomyelitis, Enzootic Bovine Leukosis, Eusinophilic granuloma complex, Equine Coital Exanthema, Equine Encephalomyelitis, Equine Infections Anemia, Equine Piroplasmosis, Erysipelas, Feline Calicivirus, Feline Immunodeficiency virus, Feline Infections Peritonitis, Feline Leukemia Virus, Feline Viral Rhinotracheitis, Fowl Cholera, Fowl Typhoid, Fowl Pox, Gastrophylosis, Giardiasis, Gumboro (Infectious Bursal Diseases), Haemobartonellosis, Histoplasmosis, Infectious Bronchitis, Infectious laryngotracheitis, Myasis, Japanese Encephalitis, Kaskado (Stefanofilariasis), Listeriosis, Lymphoid Leukosis, Malassezia Dermatitis, Malignant Catarrhal Fever, Marek Disease, Pink Eye, Microsporidiasis, Mikosis, Mycoplasmosis, New Castle Disease, Parvovirus, Pediculosis, Pasteurelosis, Phthiriasis, Pododermatitis, Pullorum, Rickettsiosis, Sarcosporidiosis, Scabies, Staphylococcosis, Streptococcosis, Swollen Head Syndrome, Theieriosis, Transmisible gastroenteritis

Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun N - Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun N-1}}{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun N-1}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%)
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

20. Persentase Unit Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Nama Indikator : Persentase Unit Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner).
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Unit usaha pangan asal hewan adalah unit usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersil yang meliputi Rumah Potong Hewan (Ruminansia/ Unggas/Babi), usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel, dan atau pengolahan pangan asal hewan.
Sertifikat NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah unit pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) tahun N}}{\text{Jumlah unit usaha asal hewan tahun N}} \times 100\%$

Satuan Hasil	:	Persentase (%).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

21. Persentase Penanganan Bencana Pertanian

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Bencana Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Proporsi kejadian bencana pertanian yang mendapatkan tindakan penanganan/intervensi.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Luas kejadian bencana pertanian yang ditangani tahun N}}{\text{Luas kejadian bencana pertanian tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

22. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah pengendalian terhadap DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Luas penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian tahun N}}{\text{Luas kejadian dampak perubahan iklim terhadap pertanian tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

23. Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan

Nama Indikator	:	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, perizinan berusaha merupakan legalitas yang penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Surat izin usaha pertanian adalah surat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan dalam melakukan aktivitas usaha di sektor pertanian. Subsektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,

sarana pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan.

Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah usaha pertanian yang mengajukan permohonan izin berusaha tahun N}}{\text{Jumlah izin usaha pertanian yang dikeluarkan tahun N}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%)

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Frekuensi : Tahunan.

Penanggung jawab : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

24. Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan

Nama Indikator : Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan.

Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.

Definisi : Penyuluh Pertanian adalah PNS dan PPPK yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang penyuluhan pertanian.

Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan adalah proporsi penyuluh pertanian yang ditingkatkan SDM nya melalu pendidikan dan latihan.

Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan sampai tahun N}}{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tahun N}} \times 100\%$

Satuan Hasil : Persentase (%).

Sumber Data : Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.

Penanggung jawab : Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

25. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk Dan Beroperasi

Nama Indikator : Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk Dan Beroperasi.

Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.

Definisi : Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan yang melaksanakan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum (koperasi, Badan Usaha Milik Petani, dan lain-lain).

Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi adalah proporsi kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan

beroperasi

Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi sampai tahun N}}{\text{Jumlah kelembagaan koperasi tani yang dibentuk sampai tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

26. Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik

Nama Indikator	:	Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Penyuluh Pertanian adalah PNS dan PPPK yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang penyuluhan pertanian. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang mampu memenuhi 9 (sembilah) indikator kinerja penyuluh N}}{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

27. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan. Dokumen yang disusun sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu: Rencana Kerja (Renja) tahun N+1, Perubahan Renja tahun N, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun N, Rencana Aksi (Renaksi) tahun N, Perjanjian Kinerja (PK) tahun N dan Perubahan PK tahun N.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

28. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

29. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

30. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan. Laporan yang disusun sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu: Laporan Kinerja (LKj) tahun N-1, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun N-1, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun N-1 dan Laporan Tahunan tahun N-1.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

31. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan. Laporan yang disusun sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen yaitu: Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebanyak 4 (empat) lokumen, Laporan capaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebanyak 4 (empat) lokumen, laporan realisasi Rencana Aksi (Renaksi) sebanyak 4 (empat) lokumen, laporan Laporan realisasi Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 4 (empat) laporan, laporan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 (tiga) laporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

32. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan data statistik sektoral lingkup Dinas Pertanian yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah data statistik sektoral lingkup Dinas Pertanian yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Data.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

33. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu

dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Berita Acara.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

34. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Nama Indikator	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang/bulan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

35. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

36. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian keuangan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan

		laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

37. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

38. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

39. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

40. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

41. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Nama Indikator	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia ASN.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

42. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Nama Indikator	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

43. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan

kepegawaian.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Paket.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

44. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Paket.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

45. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Paket.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

46. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

47. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

48. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

49. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

50. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.

Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

51. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah paket mebel yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah paket mebel yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

52. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

53. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

54. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan oleh

		sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

55. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Nama Indikator	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

56. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Nama Indikator	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

57. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

58. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Nama Indikator	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

59. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Nama Indikator	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

60. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.

Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

61. Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Nama Indikator	:	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, dan Bidang Peternakan.

62. Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih yang Diperbanyak

Nama Indikator	:	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih yang Diperbanyak.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Perbanyakan benih adalah kegiatan produksi benih bersertifikat tanaman pangan sesuai dengan standar mutu atau PTM. Perbanyakan Benih dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan penggunaan sarana pertanian (benih) terkait kebutuhan benih bersertifikat melalui perbanyakan benih yang telah disediakan pusat. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bersertifikat. Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan. Produksi benih bersertifikat adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bersertifikat yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan. Perbanyakan benih tanaman pangan dilaksanakan melalui koordinasi, pembinaan, pengadaan benih sumber tanaman pangan kelas

		Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP), pembinaan penangkar/produsen benih. Perbanyakan benih ini harus mengikuti prosedur sertifikasi benih tanaman pangan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ton.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

63. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pengolahan hasil tanaman pangan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

64. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pascapanen Perkebunan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Perkebunan.

65. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pengolahan hasil hortikultura.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura yang disusun dalam

1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

66. Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

Nama Indikator	:	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Perbanyakan benih adalah kegiatan produksi benih perkebunan bermutu sesuai dengan standar mutu atau PTM. Perbanyakan benih dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan penggunaan sarana pertanian terkait kebutuhan penambahan benih dengan perbanyakan benih sumber yang ada. Perbanyakan benih perkebunan harus berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bersertikat. Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang yang diproduksi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Batang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Perkebunan.

67. Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak

Nama Indikator	:	Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Perbanyakan benih adalah kegiatan produksi benih tanaman hortikultura bermutu sesuai dengan standar mutu atau PTM (Persyaratan Teknis Minimal) yang ditentukan. Perbanyakan benih dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan penggunaan sarana pertanian (benih) terkait kebutuhan benih bersertifikat melalui perbanyakan benih sumber (kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) yang telah disediakan pusat. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bersertikat. Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium

untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan.

Perbanyakan benih hortikultura dilaksanakan melalui koordinasi, pembinaan, pengadaan benih sumber dan batang bawah, perbanyakan benih buah, pemeliharaan pohon induk, perbanyakan benih umbi, pembinaan penangkar/produsen benih. perbanyakan benih ini harus mengikuti prosedur sertifikasi benih.

Rumus Perhitungan : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Batang.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Perkebunan.

68. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan

Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pengolahan hasil perkebunan.
Rumus Perhitungan : Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Laporan.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Perkebunan.

69. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pascapanen tanaman pangan.
Rumus Perhitungan : Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Laporan.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

70. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura adalah kegiatan yang dimaksudkan

untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pascapanen hortikultura.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

71. Jumlah SDG Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian

Nama Indikator	:	Jumlah SDG Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Varietas Unggul Baru (VUB).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

72. Jumlah SDG Hewan Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian

Nama Indikator	:	Jumlah SDG Hewan Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelestarian dan pemurnian SDGH dilakukan sesuai dengan PP 48 Tahun 2011. Sumber daya genetik hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya. Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

73. Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

74. Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar

Nama Indikator	:	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan adalah proses kegiatan pengujian mutu untuk menilai khasiat dan keamanan sediaan obat hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

75. Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak

Nama Indikator	:	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan penyediaan peredaran dan penyediaan obat hewan yang dilakukan oleh pengawas obat hewan. Penindakan dilakukan dengan melibatkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Aparat Penegak Hukum.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kasus penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Kasus.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

76. Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar

Nama Indikator	:	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT adalah pakan yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak
Rumus Perhitungan	:	Jumlah HPT, bahan pakan/pakan yang beredar dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ton.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

77. Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan peredaran dan sertifikasi adalah kegiatan pemeriksaan benih/bibit ternak yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

78. Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar

Nama Indikator	:	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Benih ternak adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran

benih/bibit ternak kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan peredaran benih/bibit ternak dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

79. Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Nama Indikator	:	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah penyediaan hijau pakan ternak yang bersumber dari daerah Kabupaten/Kota Lain dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ton.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

80. Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Nama Indikator	:	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengadaan bibit ternak yang dimaksud adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan bibit ternak yang bermutu dalam jumlah yang cukup berdasarkan perhitungan supply demand. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan
Rumus Perhitungan	:	Jumlah penyediaan bibit ternak yang bersumber dari daerah Kabupaten/Kota Lain dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ekor.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

81. Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Nama Indikator	:	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengadaan benih ternak yang dimaksud adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan benih ternak yang bermutu dalam jumlah yang cukup berdasarkan perhitungan

supply demand.

Benih Ternak adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio. Optimasi reproduksi dilakukan dengan memberikan benih ternak kepada ternak atau akseptor (satuan ekor).

Rumus Perhitungan	:	Jumlah penyediaan benih ternak yang bersumber dari daerah Kabupaten/Kota Lain dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dosis.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

82. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Nama Indikator	:	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi. 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi. 3) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan koordinasi dan sikronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

83. Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan

Nama Indikator	:	Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang. Kawasan pertanian terdiri atas kawasan pertanian nasional, kawasan pertanian provinsi, kawasan pertanian kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	:	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ha.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

84. Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pascapanen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

85. Jumlah Prasarana Pascapanen Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pascapanen Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pascapanen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Perkebunan.

86. Jumlah Prasarana Pascapanen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pascapanen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pascapanen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

87. Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengolahan hasil adalah mengubah bahan baku menjadi produk primer, setengah jadi atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun meningkatkan nilai tambah hasil pertanian asal tumbuhan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

88. Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengolahan hasil adalah mengubah bahan baku menjadi produk primer, setengah jadi atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun meningkatkan nilai tambah hasil pertanian asal tumbuhan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

89. Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengolahan hasil adalah mengubah bahan baku menjadi produk primer, setengah jadi atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun meningkatkan nilai tambah hasil pertanian asal tumbuhan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Perkebunan.

90. Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Nama Indikator	:	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Tertetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Perda/Perbup/SK Bupati, yang selanjutnya secara sinkron akan ditetapkan di dalam Perda RTRWK.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah penetapan dokumen kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian berkelanjutan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

91. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola

Nama Indikator	:	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan
yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

92. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

Nama Indikator	:	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Tersusunnya peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda Perlindungan LP2B/Peraturan Bupati
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

93. Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

Nama Indikator	:	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyusunan rencana yang akan menjadi pedoman dalam pengambangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas di lingkup kabupaten/kota. Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen action plan pengembangan prasarana, sarana dan kawasan pertanian yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.

Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

94. Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan penampung air yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya yang berfungsi untuk suplesi air irigasi pertanian yang dilapangan dapat berupa embung, dam parit dan long storage. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

95. Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

96. Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian dengan dimensi bentangan minimal 5 m. Pembangunan DAM Parit dalam rangka

pengembangan prasarana pertanian.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

97. Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya sedangkan Rehabilitasi pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada. Pembangunan pintu air dalam rangka pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

98. Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembangunan BPP adalah pengadaan bangunan BPP baru atau perbaikan/perubahan/ penambahan/perluasan bangunan yang sudah ada sesuai dengan perencanaan pembangunan BPP serta penyediaan sarana pendukung dan pemeliharaannya. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah balai penyuluhan di kecamatan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

99. Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.

Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya adalah pembangunan yang dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipeliharaan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

100. Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi

Nama Indikator	:	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelaksanaan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

101. Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

102. Jumlah Puskeswan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi

Nama Indikator	:	Jumlah Puskeswan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah puskeswan yang dibangun, direhabilitasi

dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

103. Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi

Nama Indikator	:	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian. umum. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

104. Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu. Galur ternak adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan Pengelolaan wilayah sumber bibit dilakukan oleh dinas kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk dapat mempertahankan persyaratan sesuai dengan pasal 3 dan 4 permentan 48/2011 dan 64/2012. Pembinaan terhadap pengelolaan wilsumbit dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembinaan sesuai pasal 19 mencakup: pembiayaan pendampingan dan bimbingan teknis dan pengadaan sarana

		pendukung utama pembibitan penjaminan kelangsungan pemberdayaan terbentuknya klompok pembibit dan penerapan cara pembibitan ternak yang baik (GBP).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

105. Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian program pemuliaan di wilayah sumber bibit
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

106. Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali

Nama Indikator	:	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Lokasi terdampak wabah penyakit hewan menular yang ditanggulangi.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

107. Jumlah Kader Zoonosis

Nama Indikator	:	Jumlah Kader Zoonosis.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kader zoonosis ditunjuk dari petugas teknis dinas terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan di wilayah terdampak, dan ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota dengan diberikan pelatihan dan dukungan operasional kegiatan pelaksanaan tugasnya.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah kader zoonosis yang ditetapkan dengan SK Bupati dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

108. Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan dilakukan dengan pengambilan, pengujian, analisis data dan pelaporan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Wilayah.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

109. Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti Dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti Dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyidikan penyakit hewan merupakan kegiatan yang dilaksanakan apabila hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan disuatu wilayah dan/atau adanya dugaan timbulnya wabah disuatu daerah sekurang-kurangnya dengan pengambilan sampel dan/atau spesimen untuk dapat dikirim ke laboratorium regional berikut data pendukung. Dalam mendukung penyidikan dilakukan validasi penyakit hewan dan zoonosis pada hewan untuk kemudian dilaporkan melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kejadian penyakit hewan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan penyakit hewan zoonosis pada hewan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Kasus.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

110. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Manajemen risiko meliputi tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko penularan zoonosis antara lain: 1. penutupan daerah 2. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta 3. penjaminan kebersihan kandang dan 4. pemusnahan Hewan 5. pengendalian 6. pengendalian populasi Hewan 7. pembatasan keluarnya 8. penghentian produksi dan Peredaran Produk 9. vaksinasi Hewan 10. kesiagaan dan 11. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat. Dokumen yang disusun menerangkan terkait tindakan yang dilakukan sebagaimana di atas. Wilayah terkendali zoonosisi adalah wilayah yang tidak terjadi kasus atau mengalami penurunan zoonosis pada manusia
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

111. Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	:	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan sebagai upaya pembebasan suatu Wilayah atau Kawasan dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular dan zoonosis.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

112. Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran

HPM.

Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan adalah kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen ataupun data lainnya
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

113. Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan produk Hewan dilakukan terhadap produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri dan dimasukkan dari luar negeri. Pengawasan produk Hewan antara lain pemeriksaan mutu, keamanan dan kesehatan produk Hewan, dokumen, label dan kemasan serta nomor registrasi bagi pangan segar asal hewan dalam kemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan peredaran produk hewan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

114. Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas veteriner dan dilaksanakan di pos pemeriksaan kesehatan hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran dan/atau pemeliharaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait dengan pengawasan lalu lintas HPM.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di perbatasan tempat pemeriksaan HPM yang disusun dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

115. Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya

Nama Indikator	:	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Analisis risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan Hewan yang didasarkan kepada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi atau sosialisasi risiko.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan analisis risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

116. Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium

Nama Indikator	:	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelayanan jasa Laboratorium Veteriner yang dimaksud adalah pelayanan di laboratorium sederhana yang ada di Puskeswan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

117. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Nama Indikator	:	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepaada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan termasuk di dalamnya pemenuhan sarana prasarana pendukung beserta pengembangan kompetensi tenaga kesehatan hewan sebagai pelaksanab jasa medik veteriner. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat

		kompetensi, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

118. Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan peredaran terhadap hewan dan produk hewan di wilayah Kabupaten/Kota.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

119. Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Nama Indikator	:	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelaksanaan pengujian produk hewan dilaksanakan di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, yaitu laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi, antimikroba, prion dan organisme hasil rekayasa genetik (Genetic Modified Organism/GMO).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen hasil pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

120. Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembinaan unit usaha dalam rangka penerapan persyaratan higiene sanitasi mencakup penilaian dan penerbitan NKV. Sertifikat NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan

		higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit usaha produk hewan yang dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit Usaha.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

121. Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM

Nama Indikator	:	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengelolaan Penerbitan rekomendasi pemasukan merupakan proses penerbitan rekomendasi yang dilakukan Pejabat Otoritas Veteriner yang memuat persyaratan kesehatan hewan sebagai syarat pemasukan HPM ke dalam wilayah provinsi. Pengelolaan Penerbitan rekomendasi pengeluaran merupakan proses penerbitan rekomendasi yang dilakukan Pejabat Otoritas Veteriner terkait pengeluaran HPM dari wilayah provinsi sebagai syarat lalu lintas HPM antar provinsi. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Veteriner merupakann proses sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan. SKKH/SKPH adalah pengelolaan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Surat Keamanan Produk Hewan (SKKH/SKPH).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen rekomendasi pemasukan dan pengeluaran, sertifikat veteriner, dan SKKH/SKPH HPM yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

122. Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan Hewan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

Nama Indikator	:	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan Hewan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengembangan Kompetensi petugas Teknis

		Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi adalah pengembangan kompetensi bagi petugas kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pemeriksa antemortem postmortem dan petugas teknis kesejahteraan hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang dilatih dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

123. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Peningkatan kesadaran masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka edukasi kepada masyarakat tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

124. Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang Memenuhi Persyaratan Registrasi Produk Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang Memenuhi Persyaratan Registrasi Produk Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembinaan dan pendampingan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesiapan unit usaha untuk meregistrasi produk hewan segar dalam kemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Produk.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

125. Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi Terhadap Penerapan Cara yang Baik

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi Terhadap Penerapan Cara yang Baik.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan Unit Usaha produk Hewan adalah pengawasan terhadap penerapan cara yang baik pada rumah potong dan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan. Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan. Unit Usaha produk Hewan dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit Usaha.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

126. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan

Nama Indikator	:	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani dan tidak difasilitasi oleh pusat. Pengendalian OPTsebagai salah satu upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), menjamin mutu hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat. Tindakan pengendalian dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun kuratif (telah terjadi serangan), dilaksanakan dengan prinsip PHT baik skala kecil/individual maupun skala luas.
Rumus Perhitungan	:	Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Hektar.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

127. Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani

Nama Indikator	:	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah pengendalian terhadap DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani dan yang tidak difasilitasi pusat.
Rumus Perhitungan	:	Luas area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Hektar.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

128. Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Nama Indikator	:	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

129. Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penanggulangan bencana bidang peternakan terdiri dari pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penanggulangan pasca bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.

Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

130. Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

Nama Indikator	:	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian merupakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

131. Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Nama Indikator	:	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian merupakan proses pengambilan keputusan teknis izin usaha yang didasarkan pada skala usaha dan hasil analisa risiko dari masing-masing komoditas
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

132. Jumlah Unit Usaha Pembibitan/Budidaya Ternak yang Mendapatkan Sertifikat Penerapan Cara Pembibitan/Budidaya Ternak yang Baik

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Usaha Pembibitan/Budidaya Ternak yang Mendapatkan Sertifikat Penerapan Cara Pembibitan/Budidaya Ternak yang Baik.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Sertifikasi penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik adalah di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.

Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

133. Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian merupakan pengendalian penerapan izin usaha pertanian, termasuk juga pada usaha peternakan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan izin usaha pertanian yang diawasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

134. Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Dilaksanakan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

135. Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kesesuaian antara izin usaha yang diterbitkan dengan jenis usaha yang dilakukan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

136. Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kesesuaian antara izin usaha yang diterbitkan dengan jenis usaha yang dilakukan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

137. Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha rumah potong hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

138. Jumlah Izin Usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan terhadap Operasional pelayanan jasa medik veteriner yang diberikan kepada pasien dan klien di Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner. pasar hewan adalah pasar tempat berlangsung nya jual beli hewan ternak seperti sapi,kerbau,kambing,dan lain sebagainya.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha unit rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner, atau pasar hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.

Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

139. Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penerbitan izin usaha pengecer secara redaksional terdapat pada UU 23/2014 (Kewenangan kabupaten/Kota).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan izin usaha pengencer obat hewan yang memenuhi komitmen dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

140. Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kewenangan Kabupaten/Kota di tingkat pengecer
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha pengencer obat hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

141. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPP/Posluhdes dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian sebagai tempat data dan informasi, tempat gerakan pemabngunan pertanian, tempat pembelajaran, pengembangan jejaring kemitraan para pelaku utama dan pelaku usaha, tempat konsultasi agribisnis.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

142. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

143. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Nama Indikator	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyediaan dan penggunaan sarana prasarana yang mendukung dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

144. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi

Nama Indikator	:	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Sekolah Lapang adalah Proses Pembelajaran Non Formal Bagi Petani untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan menyusun rencana usaha, mengatasi permasalahan, menerapkan teknologi sesuai sumberdaya sehingga usaha tani lebih efisien berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan, berupa demplot (0,1 Ha), dan/atau Sekolah Lapang (0,1 - 0,5 Ha).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

145. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyediaan penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah, pengembangan karir penyuluh ASN serta Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN, Penyuluh Swadaya, dan Swasta melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta kerjasama dengan pihak terkait/stakeholders lain.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah penyediaan dan peningkatan kapasitas

penyuluh pertanian dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

146. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Peningkatan kapasitas lembaga yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian dalam pengelolaan kegiatan (perencanaan, pembinaan, pengawalan, pendampingan) dan sarana prasarana penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

147. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan yang melaksanakan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum (koperasi, Badan Usaha Milik Petani, dan lain-lain).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dibentuk dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

148. Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Nama Indikator	:	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Diseminasi merupakan proses penyampaian informasi hasil pengkajian teknis, sosial dan ekonomi serta hasil dari inovasi pertanian yang disebarluaskan ke masyarakat untuk diketahui dan dimanfaatkan dalam bentuk penyampaian data dan informasi penyuluhan pertanian serta metode yang bersifat konvensional (sekolah lapang, demplot, demfarm, dam area, dll) maupun modern

		(smart farming, penyuluhan berbasis Iot, digitalisasi, dll).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.